

## Di Balik Krisis Agraria dan Ekosistem Kepulauan Seribu: Apakah Wisata Bahari adalah Jawabannya?

Adi D. Bahri, Ahmad Hamdani, Ari Wibowo

**RINGKASAN.** Kepulauan Seribu dari beberapa dekade telah mengalami degradasi dan kerusakan ekosistem yang tinggi. Kerusakan tersebut akibat perubahan alat tangkap masyarakat nelayan, semakin menyempitnya wilayah darat-pemukiman bagi masyarakat, limpahan limbah minyak kapal, limbah materi dari muara-muara sungai Teluk Jakarta, produksi sampah yang tinggi, dan aktivitas wisata bahari. Kerusakan ekosistem berdampak pada ketersediaan ikan tangkap bagi masyarakat nelayan. Kerusakan-kerusakan ekosistem tersebut diperparah dengan adanya penguasaan pulau-pulau kecil oleh privat dan swasta. Lebih dari 50% pulau-pulau di Kepulauan Seribu telah dikuasai oleh privat dan swasta. Krisis ekosistem dan agraria memberikan konsekuensi timpang pada alternatif penghidupan masyarakat, yaitu wisata bahari. Atas dasar penguasaan pulau-pulau kecil dan alat produksi yang lain, bisa dipastikan bahwa pihak yang akan mendapatkan manfaat lebih besar dari sektor wisata bahari bukanlah masyarakat nelayan, tetapi pihak yang menguasai alat produksi wisata dan khususnya privat/swasta yang menguasai pulau-pulau kecil.

Kata kunci: *krisis agrarian, krisis ekosistem, nelayan, pulau pemukiman, pulau privat, wisata bahari*

### PENDAHULUAN

Kepulauan Seribu mempunyai karakteristik ekosistem yang berbeda dengan wilayah pulau besar di Indonesia. Wilayah perairan dengan pulau-pulau kecil memiliki tipologi ekosistem yang lebih spesifik. Pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua cenderung mempunyai ketahanan yang tinggi akibat faktor luar seperti gelombang angin dan air laut, pasang-surut air laut dan lain sebagainya. Selain itu pulau-pulau besar mempunyai keragaman ekosistem, dari pegunungan; dataran rendah; hingga pantai. Hal demikian tidak ditemukan di dalam ekosistem pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, pulau-pulau kecil lebih cenderung mempunyai kerentanan yang cukup tinggi akibat faktor alam seperti gelombang angin dan air laut, dan pasang-surut air laut. Kerentanan Kepulauan Seribu tidak tanpa alasan. Pada rentan waktu 1970an hingga 2016 telah terdapat empat (4) pulau kecil yang tenggelam secara alami (Utomo 2015), di gugus Pulau Pari misalnya mempunyai tingkat kerentanan hingga 50% atau mencapai luasan 125.9 ha (Widayanto *et al.* 2009).

Kerusakan dan degradasi lingkungan dan ekosistem di wilayah Kepulauan Seribu telah terjadi dalam beberapa dekade yang cukup lama. Menurunnya kondisi ekosistem tersebut salah satunya bisa dilihat dari perkembangan dan perubahan biota lautnya. Hasil penelitian van der Meij *et al.* (2010) melaporkan bahwa dalam kurun waktu 1920 hingga 2005 telah hilang tiga (3) famili koral di wilayah Teluk Jakarta dan dua (2) koral di wilayah Kepulauan Seribu bagian utara. Kerusakan ekosistem dominan terjadi akibat

penangkapan ikan, penambangan karang, limbah materi limbah dari pembuangan minyak kapal dan materi limpasan dari 13 muara yang berada di Teluk Jakarta, serta kegiatan pariwisata (Uneputty dan Evans 1997; Willoughby *et al.* 1997; Sachoemar 2008; van der Meij *et al.* 2010; Farhan dan Lim 2011, 2012, 2013).

Turunnya fungsi ekosistem yang berawal dari hilang dan rusaknya karang berakibat pada turunnya performa daya sedia ekosistem terhadap penghidupan masyarakat. Menurut Sensus Penduduk 2010, BPS (2010a) menyebutkan bahwa terdapat 3,894 jiwa atau 48.15% dari 8,087 jiwa warga Kepulauan Seribu dengan pola nafkahnya melalui usaha perikanan baik tangkap ataupun budidaya. Rusaknya ekosistem sebagaimana yang telah disebutkan di atas berpotensi pada semakin sedikitnya ikan hasil tangkapan nelayan akibat berkurangnya kualitas habitat ikan laut, terumbu karang (Mujiyani *et al.* 2002).

Di balik kerusakan/krisis ekosistem yang telah terjadi, yang berakibat pada sempitnya ruang dan pola nafkah masyarakat nelayan, terdapat sebuah usaha pembangunan dan pengembangan Kepulauan Seribu oleh Pemerintah Pusat. Usaha tersebut adalah pengembangan wisata bahari yang berbasis eko-wisata (Bappenas 2016; Ratman 2016). Pembangunan pariwisata tersebut masuk dalam kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN. KSPN telah menjadi salah-satu arahan kebijakan Presiden Indonesia, Joko Widodo. Hal ini telah disampaikan pada Arahan Presiden pada Sidang Kabinet awal tahun 2016 (Tim 10 Destinasi 2016). Keputusan Pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata dilatar-belakangi pasar potensial yang akan di dapatkan oleh Negara. Statistik Devisa Negara, Pusdatin Kementerian Pariwisata di dalam Bappenas (2016) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2013-2015 sektor pariwisata telah menyumbangkan devisa tertinggi keempat setelah migas, batu bara, dan kelapa sawit. Capaian yang telah diperoleh pada tahun 2014 adalah dididapkannya devisa mencapai Rp120 triliun dengan jumlah 259 juta wisatawan, hadirnya kebijakan pengembangan pariwisata diharapkan pada tahun 2019 Indonesia akan memperoleh devisa mencapai Rp240 triliun dengan total wisatawan mencapai 295 juta jiwa (Bappenas 2016).

Untuk mempercepat KSPN telah disusun prioritas wilayah yaitu 10 Destinasi Prioritas Pariwisata, antara lain: 1) Borobudur; 2) Mandalika; 3) Labuan Bajo; 4) Bromo-Tengger Semeru; 5) Kepulauan Seribu; 6) Danau Toba; 7) Wakatobi; 8) Tanjung Lesung; 9) Morotai; dan 10) Tanjung Kelayang. Kepulauan Seribu mempunyai statistik yang cukup menarik, yaitu telah terjadi kenaikan jumlah wisatawan cukup besar mencapai 254.10% dalam tahun 2012-2013 atau 4,627 wisatawan pada tahun 2012 menjadi 16,384 wisatawan pada tahun 2013 (Tim 10 Destinasi 2016). Hal ini berbeda dengan daerah yang lain yang cenderung pertumbuhan wisatawan tidak lebih dari 30% bahkan mayoritas minus. Selain argumentasi ekonomi di atas, Pemerintah berkeyakinan bahwa pembangunan sektor pariwisata mempunyai tingkat kerusakan yang lebih rendah dibandingkan sektor yang lain (Bappenas 2016), tetapi kondisi tersebut masih mendatangkan perdebatan yang cukup kuat di kalangan para akademisi (Putro 2016).

Melalui paper ilmiah ini, penulis menjawab pertanyaan di atas pondasi apakah KSPN akan beridiri. Jawaban atas pertanyaan tersebut diperoleh dengan mengajukan dua (2) pertanyaan khusus, yaitu: 1) bagaimana kondisi struktur agraria di Kepulauan Seribu; dan 2) bagaimana kondisi ekosistem dan lingkungan hidup di Kepulauan Seribu.

## KEPULAUAN SERIBU

Kepulauan Seribu berada di lepas pantai utara Jakarta berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, timur dan barat. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta dan daratan Jakarta yang merupakan wilayah Kotamadya Jakarta Utara serta Provinsi Banten dan Jawa Barat. Secara geografis selanjutnya, Kepulauan Seribu dibagi ke dalam dua (2) gugus kepulauan, yaitu: 1) Gugus utara (GU) dan 2) Gusus selatan (GS). GU mempunyai gugus pulau yang cukup rapat, yaitu jarak antara pulau relatif dekat dibandingkan pada GS. Gugus pulau yang terletak pada GU dimulai dari Pulau Peteloran di ujung utara hingga dengan Pulau Karang Besar. Pada GS, gugus pulau cukup berjauhan dimulai dari Pulau Tidung Besar hingga pada Teluk Jakarta, hingga pula Pulau Sabira (Sachomar 2008).



**Gambar 1** Peta lokasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sumber: Bakosurtanal: petakita.ina-sdi.or.id

Posisi Kepulauan Seribu secara terletak antara  $5^{\circ}10'00''$ – $5^{\circ}57'30''$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ}19'30''$ – $106^{\circ}44'50''$  Bujur Timur (BPS Kep. Seribu 2016). Kepulauan Seribu mempunyai karakteristik dan kondisi ekosistem yang berbeda dengan wilayah DKI Jakarta lainnya. Wilayah ini merupakan gugusan pulau-pulau yang terbentuk oleh terumbu karang yang berupa biota koral dan asosiasianya. Perbedaan karakteristik ekosistem menjadikan Kepulauan Seribu dengan kebijakan pembangunan dengan pengembangan wilayah kepulauan dengan arah: 1) meningkatkan kegiatan pariwisata; 2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut; dan 3) pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang dan mangrove.

Kepulauan Seribu sebelumnya merupakan kecamatan yang menjadi bagian dari Kota Administrasi Jakarta Utara. Tetapi, melalui UU No.34/1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI, Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Administrasi dan terpisah dari Kota Administrasi Jakarta Utara. Kabupaten kepulauan Seribu memiliki luas daratan  $8.70 \text{ km}^2$  atau 870 ha dan luas total (daratan dan perairan) mencapai  $11.8 \text{ km}^2$  atau 1,180.8 ha yang terbagi menjadi 6 kelurahan, dan 2 kecamatan, dengan 110 pulau. Secara administrasi dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, wilayah Kepulauan Seribu

yang menjadi pulau pemukiman hanya terdapat 11 pulau dengan total luas pulau pemukiman mencapai 230.22 ha. Sebelas pulau yang dimaksud sebagaimana pada **Tabel 1** di bawah.

**Tabel 1**

Jumlah dan luas pulau pemukiman di Kepulauan Seribu

Kecamatan Kelurahan	Jumlah Pulau	Pulau Pemukiman	Luasan (ha)
<b>A. Kepulauan Seribu Selatan</b>	<b>31</b>	<b>5 (lima)</b>	<b>167.56</b>
1. Pulau Tidung	6	P. Payung	20.86
		P. Tidung	50.13
2. Pulau Pari	10	P. Lancang	15.13
		P. Pari	41.32
3. Pulau Untung Jawa	15	P. Untung Jawa	40.10
<b>B. Kepulauan Seribu Utara</b>	<b>79</b>	<b>6 (enam)</b>	<b>62.68</b>
1. Pulau Panggang	13	P. Panggang	9
		P. Pramuka	16
2. Pulau Kelapa	36	P. Kelapa	13.09
		P. Kelapa Dua	1.9
3. Pulau Harapan	30	P. Harapan	6.7
		P. Sebira	8.82

Sumber: [BPS Kep. Seribu \(2016\)](#)

Secara demografi, jumlah penduduk di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu mencapai 23,321 jiwa dengan 5,830 rumah tangga (RT). Dengan luasan daratan pemukiman yang ada, didapatkan besaran kepadatan penduduk mencapai 2,680 jiwa/km<sup>2</sup> di mana wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan mencapai 3,132 jiwa/km<sup>2</sup> dan 2,437 jiwa/km<sup>2</sup> untuk Kecamatan Kepulauan Seribu Utara ([BPS Kep. Seribu 2016](#)). Keadaan geografis dan ekosistem pulau-pulau kecil dan perairan menjadikan mayoritas penduduk berusaha dalam bidang perikanan sebagai nelayan. Bidang perikanan mampu memberi lapangan usaha bagi 3,894 jiwa, selanjutnya adalah perdagangan mencapai 1,179 jiwa dan jasa kemasyarakatan mencapai 1,087 jiwa ([BPS 2010c](#)).

## SEJARAH PENGUASAAN TENURIAL PULAU

### Kondisi Singkat Sosial Masyarakat

Kepulauan Seribu dahulunya merupakan tempat menyepinya para penyebar agama Islam.<sup>1</sup> Salah satunya adalah Habib Ali, yang masih kerabat dengan Mbah Priuk. Karena merekalah ajaran Islam begitu menguat di Kepulauan Seribu. Jejak-jejak ajaran ini masih kental terlihat sampai sekarang. Kebiasaan ibadah agama Islam dan nilai-nilai agama sebagai pegangan masyarakat masih melekat kuat pada masyarakat. Ini terlihat dari ramainya masjid-masjid ketika tiba waktu shalat, khususnya waktu maghrib, isa, dan

<sup>1</sup> Masyarakat menyebutnya sebagai *Wali Allah*.

jum'atan. Masih banyak anak-anak berangkat belajar membaca al-Quran. Sehingga, tidak bisa membaca al-Quran menjadi hal yang tidak wajar.

Tentu saja banyak perubahan-perubahan yang terjadi menyangkut kebiasaan masyarakat. Misalnya, dahulu, belajar ilmu beladiri atau pencak silat merupakan tradisi yang dimiliki warga. Warga belajar pencak silat selepas belajar agama. Kecakapan dalam olah kanuragan melalui pencak silat menjadikan warga kuat dan ulet atau tahan banting. Hal ini menjadi bekal penting bagi warga khususnya pemuda di Kepulauan Seribu. Perubahan drastis terjadi pada tahun 2000an. Perkenalan akan teknologi seperti permainan/game playstation, telepon genggam dan lain sebagainya berakibat pada sikap dan sifat pemuda yang 'manja'.

Banyak hal yang dianggap sebagai keromantisan masa lalu —hubungan sosial, budaya, dan alam— pelan-pelan berubah. Perubahan menjadi cepat sejak tahun 1970an. Semakin cepat pada pasca reformasi, khususnya pada tahun 2000an. Pada tahun 1960an menjual tanah merupakan hal yang tabu bagi masyarakat. Pada saat itu terdapat tokoh yang mempunyai wibawa dan menjadi panutan masyarakat, yaitu Camat Darmo. Camat Darmo melarang warganya menjual tanah kepada pihak luar. Aturan ini menjadi sebuah norma di lingkungan masyarakat.

Tahun 1970an hingga 1980an, suasana 'guyup' kental terasi di lingkungan masyarakat. Gotong-royong, bantu-membantu menjadi hal yang biasa bagi warga. Ketika warga mengadakan hajatan, seperti pernikahan, semua masyarakat disibukkan untuk saling membantu. Secara alami pembagian-pembagian tugas ketika terdapat hajatan terbentuk dengan sendirinya. Sehingga dalam satu pulau merasa memiliki dan bertanggung jawab atas acara hajatan tersebut.

## Sejarah Tenurial

Sejarah penguasaan sumber-sumber agraria kepulauan dan tenurial di Kepulauan Seribu sangat berhubungan erat dengan sejarah terbentuknya pemukiman penduduk masyarakat, yang oleh masyarakat menyebut dirinya sebagai "orang pulo". Penuturan masyarakat menyebutkan bahwa Pulau Panggang merupakan pulau pemukiman pertama di Kepulauan Seribu wilayah utara dan sebagian tengah (sejarah Pulau Panggang bisa dibaca di **Kotak 1**, Pulau Pari di **Kotak 2**, dan Pulau Untung Jawa di **Kotak 3**). Penguasaan darat Pulau Panggang awal tahun 1950 dikuasai oleh 198 orang,<sup>2</sup> yang oleh "orang pulo" disebut dengan "tanah adat".<sup>3</sup> Penguasaan tersebut membagi wilayah darat untuk pemukiman dan dikuasai oleh rumah tangga-rumah tangga (RT). Kepemilikan darat dengan luasan yang besar dimiliki oleh elit-elit masyarakat saat itu. Penguasaan ini juga terjadi pada penguasaan pulau-pulau khususnya di wilayah utara. Seperti contoh Pulau Pramuka, sebelumnya bernama Pulau Elang, dahulunya merupakan pulau tidak berpenghuni dan hanya dipergunakan untuk mengambil hasil bumi seperti kelapa. Tetapi pada awal tahun 1970an atas pelopor Lurah pertama Pulau Panggang. Pelopor pertama itulah yang mempunyai wilayah penguasaan darat Pulau Pramuka yang

<sup>2</sup> Menurut risalah kepemilikan tanah Kelurahan Kepulauan Panggang.

<sup>3</sup> Tanah adat adalah tanah milik yang bisa dipindah kepemilikannya seperti dijual, di wariskan dan lain-sebagainya.

paling besar. Kemudian berdatangan penduduk lain untuk bermukim di pulau dengan cara membeli tanah kepada penduduk pertama.

### **Kotak 1**

#### Sejarah Pulau Panggang

Terdapat beberapa versi yang menceritakan sejarah awal mula Pulau Panggang. Tetapi dari wawancara, terdapat pengkerucutan cerita sejarah Pulau Panjang, menjadi dua versi besar, yang diawali dari seorang pendekar yang belakangan dinamakan oleh penduduk Pendekar Darah Putih. Pendekar Darah Putih merupakan seorang pendekar yang berasal dari daerah Mandar, yaitu di wilayah Sulawesi Barat, saat ini. Bernama Darah Putih karena ketika berperang melawan perompak Pendekar Darah Putih terkena sabetan pedang dilengannya. Sabetan pedang yang melukai pendekar menyebabkan terluka, tetapi luka tersebut tidak mengeluarkan darah berwarna merah, melainkan darah berwarna putih. Saat itulah lelaki tersebut dijuluki Pendekar Darah Putih oleh masyarakat.

Versi pertama sejarah Pulau Panggang. Di suatu waktu terjadi pertempuran cukup besar antara perompak dan masyarakat Pulau Panggang. Perompak mempunyai persenjataan lebih baik dibandingkan masyarakat. Pendekar Darah Putih menyusun siasat/strategi perang dengan membuat perapian besar/pemangangan bersama masyarakat. Api yang dibakar cukup besar sehingga para perompak ketakutan dan menyebabkan beberapa perompak lari dan kabur. Terdapat beberapa perompak yang berhasil ditahan/tawan. Tawanan tersebut ditempatkan di wilayah di balik perapian. Dengan siasat menakut-nakuti tawanan, atas ide Pendekar Darah Putih, masyarakat membakar seekor kambing dan salah-satu dari masyarakat berteriak-teriak seolah terbakar. Ide ini dimaksudkan bawa salah satu tawanan seolah dibakar hidup-hidup dalam perapian. Sejak saat itulah wilayah daratan pulo disebut dengan Pulo Panggang (Pulau Panggang).

Versi kedua sejarah Pulau Panggang. Di suatu waktu terjadi pertempuran yang cukup besar antara perompak dan masyarakat. Pendekar Darah Merah merancang strategi agar masyarakat menyerang dengan cara mengepung para perompak hingga perbekalan perompak habis. Dari hasil penyerangan dan pengepungan, bersisa beberapa perompak. Karena persediaan makanan perompak habis, dari beberapa perompak sepakat untuk mengorbankan salah-satu dari perompak untuk dibunuh dan dipanggang untuk kebutuhan makan perompak. Dari itu, dipangganglah salah-satu perompak untuk menjadi bahan makanan dengan perapian yang cukup besar. Di saat itulah dikenal daratan panggang dan wilayah pulo disebut dengan Pulau Panggang.

Sejarah Pulau Panggang cukup penting untuk diceritakan, karena di wilayah pulau-pulau di Kepulauan Seribu, di Pulau Pangganglah awal-mula terciptanya pemukiman masyarakat. Dalam perkembangan waktu, penduduk Pulau Panggang melakukan pelayaran/menangkap ikan hingga ke utara dan membuka lahan untuk pemukiman seperti di Pulau Harapan, Kelapa dan lain-lain. Begitu pula di beberapa pulau di wilayah selatan, penduduk asli/awal Pulau Tidung, Pulau Pari, dan lain sebagainya merupakan masyarakat Pulau Panggang yang berlaut hingga ke pulau-pulau tersebut.

Sejarah pemukiman di Pulau Panggang berkembang ke beberapa pulau lain yang pada akhirnya membentuk pulau-pulau pemukiman lainnya. Penduduk di Kepulauan Seribu seperti halnya asal-muasal penduduk di pulau-pulau kecil di Indonesia, yaitu merupakan dari penduduk nelayan atau pelaut. Asal-mula penduduk di Kepulauan Seribu berasal dari berbagai macam suku, khususnya bagian tengah hingga berasal dari Bugis; Mandar; Makasar; dan Banten. Sedangkan asal-muasal penduduk di wilayah selatan dominan berasal dari nelayan yang berasal dari Tangerang dan Banten.

## **Kotak 2**

### Sejarah Pulau Pari

Sejarah Singkat Pulau Pari Kepulauan Seribu awal mulanya adalah sebuah pulau pulau kosong yang tidak berpenghuni dan belum memiliki Nama. Pulau ini diberikan nama antara tahun 1895 an sampai awal 1900-an. Dinamakan Pulau Pari ini sebab dahulu diwilayah laut dangkal di Pulau Pari banyak sekali ikan pari dan juga bentuk Pulau yang menyerupai bentuk ikan Pari, kerana itu disebutlah "Pulau Pari". Masuknya penduduk di Pulau Pari berawal pada masa penjajahan belanda bahwa di kawasan Tangerang - Banten, warga Tangerang tersebut melarikan diri ke Pulau Pari untuk menghindari kerja paksa oleh belanda. Menurut beberapa sesepuh di Pulau Pari menyebutkan bahwa yang pertama kali mendiami Pulau Pari adalah keluarga pak arsyad beserta istri dengan lima anaknya.

Setelah beberapa tahun Pulau Pari dihuni oleh warga tangerang tersebut dan berbondong-bondong ke Pulau Pari untuk menghindari kerja paksa. Keharmonisan dan kerukunan ketentraman warga Pulau Pari membuat warga tangerang merasa nyaman tinggal di Pulau pari. Akhirnya setelah belanda meninggalkan Indonesia dipertengahan tahun 1942 maka Jepang sebagai penjajah pengantinya masuk ke Pulau Pari. Melihat hal tersebut akhirnya warga Pulau Pari dipaksa oleh jepang untuk menjadi nelayan tanpa dibayar satu sepeserpun, untung saja hal tersebut tidak berlangsung lama karna di tahun 1945 Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Selain menjadi nelayan, warga di Pulau Pari juga berkebun seperti menanam tanaman kelapa dan sukun.

Setelah kemerdekaan, kehidupan sosial-ekonomi warga di Pulau Pari selanjutnya berkembang dari yang awal mula berkebun dan nelayan, sebagian warga mulai melakukan budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut berawal dari masuknya Lembaga Oceanografi Nasional yang membuka basecamp sementara di Pulau Tikus dan Pulau Kongsi pada tahun 1960. Karena melihat banyak penduduk di Pulau Pari, lembaga tersebut bekerja sama dengan penduduk setempat untuk mengembangkan budidaya rumput laut dengan jenis bali hijau, bali kelabu dan bali merah. Karena semakin intens hubungannya dengan penduduk, dan kebutuhan ketersediaan logistik kantor penelitian dari warga, maka pada tahun 1967 dibangunlah stasiun UPT. Loka Pengembangan Kompetensi SDM Oceanografi Pulau Pari, Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI. Dekatnya kerja LON-LIPI sebagai lembaga penelitian dengan warga Pulau Pari sebagai subjek adopsi inovasinya, akhirnya menemukan hasil memuncak pada tahun 1997–2001. Disaat krisis moneter di Jakarta, tidak mengganggu kejayaan ekonomi warga atas budidaya rumput laut di Pulau Pari. Bahkan pasar rumput laut di Pulau Pari pada waktu itu sampai menembus pasar ekspor.

Setelah tahun 2001 kejayaan budidaya rumput laut warga mulai menurun karena faktor limbah yang diakibatkan pembangunan reklamasi pulau H (sebelah Pulau Pari yang mengambil karang dan batu karang dari sekitar Pulau Pari) dan limbah dari buangan minyak kapal. Budidaya rumput laut terhenti juga karena pada saat puncak kejayaan budidaya rumput laut, kondisi di Pulau Pari terjadi wabah Malaria. Malaria terjadi disinyalir diakibatkan karena bekas cucian pengolahan agar rumput yang tidak diperhatikan kebersihannya.

Rumput laut untuk saat ini tidak menjanjikan ekonomi lagi untuk saat ini, hal ini dikarenakan setelah produksi besar-besaran berhenti, nelayan pembudidaya rumput laut kehilangan pasarnya. Budidaya rumput laut saat ini harus dilakukan secara kolektif kembali, dan membutuhkan produksi yang banyak untuk menembus pasar. Ekonomi andalan untuk warga Pulau Pari saat ini adalah nelayan dengan usaha sampingan sewa *homestay*.

Selanjutnya, penguasaan pulau-pulau secara masif terjadi pada saat pemerintahan orde baru (Orba). Sebelumnya penguasaan pulau dimiliki oleh masyarakat asli pulau, tetapi sejak bergulirnya Orba penguasaan telah berubah. Perubahan yang terjadi adalah penguasaan pulau oleh masyarakat dari luar Kepulauan Seribu, "orang pulo" menyebutnya "orang darat" yang merujuk pada masyarakat dari DKI Jakarta atau Pulau Jawa. Transfer kepemilikan pulau terjadi melalui beberapa proses, yaitu jual-beli pulau; tukar-menukar pulau dengan imbalan alat-sarana tangkap nelayan; dan penggantian biaya ibadah haji. Hal ini terjadi misalnya transfer kepemilikan Pulau Tidung. Pulau Tidung, dibeli oleh pemerintah dengan alasan untuk dijadikan pertanian. Namun penjual pulau itu kecewa karena ternyata tidak diutamakan untuk pertanian, melainkan lebih cenderung untuk pariwisata yang dikuasai oleh privat.

### **Kotak 3**

#### Sejarah Pulau Untung Jawa

Pulau Untung Jawa memiliki cerita sejarah dari kolonialisme seputar Pemerintahan Hindia-Belanda, Pemerintahan Jepang (*Dai Nippon*) hingga kemerdekaan di Pemerintahan Republik Indonesia. Pada masa pemerintah Hindia-Belanda, pulau-pulau di wilayah Kelurahan Pulau Untung Jawa telah dihuni oleh orang-orang pribumi yang berasal dari daratan Pulau Jawa khususnya Betawi. Sejak tahun 1920an wilayah ini dipimpin oleh seseorang yang biasanya disebut dengan panggilan "Bek" (biasa disebut Lurah untuk saat ini). Bek Fi'I dan Bek Kasim, mereka berdomisili di Pulau Kerkof (Pulau Kelor). Kedua Bek tersebut adalah pemimpin-pemimpin yang membawahi pulau-pulau yang ada disekitarnya yakni ([van der Meij et al. 2010](#)):<sup>4</sup>

1. Pulau Amterdam (Pulau Untung Jawa)
2. Pulau Middbur (Pulau Rambut, Suaka Margasatwa)
3. Pulau Rotterdam (Pulau Ubi Besar)
4. Pulau Schiedam (Pulau Ubi Kecil)
5. Pulau Purmerend (Pulau Bidadari, Pulau Sakit)

<sup>4</sup> Istilah atau nama pulau pada poin-poin tersebut bisa dilacak melalui publikasi van der Meij *et al.* (2010).

6. Pulau Kerkof (Pulau Kelor)
7. Pulau Kuiper (Pulau Cipir, Pulau Burung, Pulau Khayangan)
8. Pulau Onrust (Pulau Sibuk, Pulau Kapal)

Sekitar tahun 1930-an Bek Fi'I dan Bek Kasim digantikan oleh Bek Marah. Beliau menganjurkan rakyatnya yang tinggal di Pulau Kerkof untuk pindah ke Pulau Amiterdam karena adanya abrasi di Pulau Kerkof. Perjalanan menggunakan perahu layar kurang lebih 8 jam sampai di Pulau Amiterdam yang memang sudah ada penduduknya dan penduduk Pulau Amiterdam menerima kedatangan mereka dengan senang hati. Beberapa penduduk (antara lain Cule, Kemple, Derahman, Derahim, Sa'adi, Saemin) menganjurkan kepada para pendatang tersebut agar segera memilih lahan dan langsung menggarapnya karena terkait kebutuhan untuk hidup. Hubungan saling percaya dan terbuka antara warganya terlihat sangat tinggi, menggambarkan karakteristik kehidupan masyarakat Pulau-pulau kecil. Pada akhirnya di Pulau Amiterdam berganti nama menjadi "Pulau Untung Jawa" yang berarti "Keberuntungan bagi orang-orang dari daratan Pulau Jawa pada saat itu".

Nama-nama Pulau di kawasan Kelurahan Untung Jawa memiliki kemiripan dengan nama-nama kota di Belanda. Hal ini berkaitan pada saat itu Pulau Untung Jawa menjadi benteng pertahanan laut dibawah penjajahan Belanda. Bukan hanya di kelurahan Pulau Untung Jawa, kelurahan Pulau Panggangpun juga memiliki sejarah sebagai pos pertahanan laut seperti Pulau Untung Jawa. Namun disinyalir karena di Pulau Onrust (yang berada 3 mil sebelah Pulau Untung Jawa) terdapat bekas benteng Belanda, maka disinilah Pusat pengawasan Laut Belanda sebelum masuk ke Batavia.

Pada tahun 1940-an tibalah saat kemalangan bagi penduduk pulau Untung Jawa, yakni datangnya serangan nyamuk besar-besaran. Karena tidak tahan dengan penderitaan penduduknya, Bek Saenan yang menjabat sebagai pemimpin saat itu menyarankan untuk bermukim ke Pulau Ubi Besar. Kepindahan ke Pulau Ubi Besar malah semakin menambah penderitaan warga. Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang biasa mereka dapat dengan mudah dari pasar ikan Sunda Kelapa, Di Pulau Ubi hal tersebut menjadi sangat langka karena jauhnya ke daratan. Selain jauhnya daratan, selanjutnya juga disebabkan oleh adanya kedatangan tentara *Nippon* (Jepang) yang menjajah saat itu. Namun hal ini tidak berlangsung lama.

Tahun 1945, perubahan besar terjadi di seluruh pelosok Nusantara, karena Indonesia telah merdeka dari belenggu penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945. Perubahan itupun dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Seribu, karena Bek yang biasa dipanggil oleh penduduk berubah panggilannya menjadi "Lurah" dan berubah pula struktur kepemimpinan - kelembagaan di masyarakat.

Hari berganti hari dan bulanpun demikian, tanpa disadari Pulau Ubi Besar tidak luput dari abrasi, maka atas prakarsa Lurah Maesan dengan persetujuan Pemerintah, mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Pulau Untung Jawa. Pada tanggal 13 Februari 1954, Lurah Maesan bersama-sama dengan masyarakat berinisiatif mendirikan "Tugu Peringatan Perpindahan Masyarakat Pulau Ubi ke Pulau Untung Jawa" yang terletak di tengah Pulau Untung Jawa. Mulai saat itu semakin banyak kemajuan yang dirasakan oleh Masyarakat Pulau Untung Jawa berkat perhatian besar yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat.

Mekanisme pembelian pulau menjadi pulau pribadi, sama dengan pembelian tanah seperti biasa. Pemilik pulau pribadi biasanya membeli tanah kepada beberapa pemilik tanah di pulau yang dibelinya. Seperti Adam Malik, membeli Pulau Genteng Besar kepada lima pemilik tanah di pulau tersebut. Pembelian pulau secara pribadi oleh orang luar tersebut, warga yang menempati Pulau Genteng (Komunitas Bugis), dipindahkan ke Pulau Kongsu (sekarang Pulau Kelapa Dua). Walaupun, menurut cerita warga Pulau Kelapa Dua, mereka dibelikan oleh Adam Malik sebagai tempat tinggal mereka. Saat ini, sebagian besar penguasaan pulau bukanlah oleh penduduk pulau itu sendiri. Sekitar tahun 1960 hingga 1970an pulau dikuasai dan dimiliki oleh pribadi. Pulau yang dikuasai oleh masyarakat hanya pulau-pulau pemukiman, yaitu: Pulau Untung Jawa, Tidung, Pari, Pramuka, Panggang, Harapan, Kelapa, Kelapa Dua, dan Sebira.

Pembelian pulau oleh orang-orang luar pulau menjadi pulau pribadi ini semakin menyempitkan akses masyarakat terhadap pulau. Fungsi sosial pulau, khususnya pulau tak berpenghuni, hilang secara perlahan. Misalnya, fungsi pulau sebagai tempat istirahat para nelayan, tempat untuk berteduh para nelayan ketika ada badai, tempat berkebun. Penguasaan yang terjadi berakibat pada hilangnya tempat untuk istirahat dan berteduh bagi masyarakat karena pulau-pulau yang telah dimiliki secara privat dijaga secara ketat oleh *security*/penjaga. Selain itu, pada mulanya masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sayur-mayur dan kelapa dengan berkebun di pulau-pulau tidak berpenghuni. Tetapi fenomena tersebut sudah tidak bisa dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Seribu.

### **Penguasaan Pulau dan Modus Penguasaan**

Bergulirnya pemerintahan Orba menjadi periode penguasaan pulau-pulau secara privat baik oleh pribadi-pribadi ataupun swasta. Total jumlah pulau yang berada di Kepulauan Seribu adalah 110 pulau. Kondisi saat ini (Utomo 2015) terdapat 60 pulau yang dikuasai dan dimiliki oleh pribadi, 11 pulau dikuasai oleh penduduk sebagai pulau pemukiman, dan 39 pulau yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda).<sup>5</sup>

Penulis di bagian atas telah menyampaikan bahwa modus penguasaan pulau di Kepulauan Seribu terbagi menjadi tiga, yaitu 1) jual-beli pulau; 2) tukar-menukar pulau dengan imbalan alat-sarana tangkap nelayan; dan 3) penggantian biaya ibadah seperti haji. Jual-beli pulau dilakukan dengan beberapa sistem dan perantara, seperti yang terjadi di Pulau Pari bahwa elit kelurahan saat itu menyalah-gunakan kewenangannya dengan cara memperjual-belikan tanah/pulau kepada pihak swasta secara sepihak. Sehingga saat ini proses-proses privatisasi pulau oleh swasta telah menimbulkan konflik tenurial dengan masyarakat Pulau Pari (lebih detilnya pada **Kotak 4**). Jual-beli yang dilakukan secara sepihak tanpa diketahui oleh masyarakat dan warga Pulau Pari. Padahal wilayah-wilayah darat di pulau tersebut merupakan tanah pemukiman masyarakat dan budidaya rumput laut. Masyarakat merasa ditipu dari proses jual-beli yang terjadi, bagaimana terdapat proses jual beli yang pada awalnya surat keterangan tanah yang diminta oleh aparat kelurahan kepada masyarakat, melalui sosialisasi, bukanlah untuk kepentingan jual beli. Ketika masyarakat mengetahui, pihak swasta dan pemerintah kelurahan saat itu memberikan solusi dengan ganti rugi dan relokasi masyarakat ke pulau lain. Tetapi hal tersebut tidak terjadi hingga saat ini.

<sup>5</sup> Budi Utomo adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang menjabat pada era saat ini.

**Kotak 4**

## Sejarah Tenurial di Pulau Pari

Kelurahan Pulau Pari memiliki 12 Pulau yang berada dalam satu area kelurahan. Dari jumlah tersebut sebanyak dua pulau yakni Pulau Pari dan Pulau Lancang peruntukannya digunakan untuk pemukiman. Di Pulau Pari beberapa diantaranya diperuntukan Perkantoran, Terbuka Hijau, Budidaya, Perdagangan, dan jasa. Pulau Pari dihuni oleh 1.056 penduduk dari total penduduk kelurahan Pulau Pari yang berjumlah 2.861 penduduk. Pulau Pari terbagi atas 4 Rw, 3 RW berada di Pulau Lancang dalam satu pulau dan 1 RW berada di Pulau Pari. Dengan Luasan Pulau Pari dengan total 42 Ha, sangat padat untuk menampung 1.056 penduduk. Kondisi daratan di Pulau Pari dan Kelurahan Pulau Pari sudah sangat padat. Kondisi tersebut dibarengi juga bahwa daratan-daratan diatas pulau-pulau kecil atau 10 Pulau lainnya sudah digunakan untuk peruntukan privat.

Bagi warga pulau Pari, bahwa pulau-pulau disekitar Kelurahan Pulau Pari memiliki akses bersama. Walau daratan di pulau tersebut dimiliki, menurut nelayan bahwasanya pantai tidak boleh dimiliki oleh perseorangan. Saat melaut, kadang nelayan menjumpai badai yang terjadi dilaut. Pada saat kondisi tersebut nelayan membutuhkan tempat untuk bersandar perahunya hingga badai menghilang. Beberapa kasus pernah terjadi bahwa nelayan di usir dari Pulau-pulau yang dimiliki oleh privat tersebut. Hal ini pertama menimbulkan ketimpangan akses.

“...pemilik-pemilik pulau pribadi lewat penjaganya pernah melarang nelayan bersandar di Pantainya, hal ini bertentangan dengan undang-undang pemerintah. Bagi kita nelayan bahwasanya pantai tidak boleh dikuasai oleh pribadi. Dari turun-temurun setelah Ali Sadiqin berganti ke gubernur selanjutnya, itulah saat banyak pulau-pulau dikuasai pribadi...”

Pada awalnya, secara urusan kepemilikan lahan, Pulau pari jauh sebelum tahun 1960 sudah dihuni penduduk, Walaupun belum seramai saat ini. Warga yang menempati Pulau Pari, Melakukan pendaftaran tanah yang menghasilkan surat girik pada saat itu.

Sehubungan dengan masyarakat pulau pari saat itu belum memiliki RT dan RW maka dari itu mereka menggunakan alamat pulau yang sudah memiliki RT dan RW. Sesuai alamat dari keluarga yang dari Pulau yg sudah memiliki RT dan RW yang di gunakan untuk mendaftarkan tanah ada dua pulau, yaitu Pulau Tidung dan Pulau Panggang, hal tersebut Sesuai dari saudara yg paling dekat hubungan saudaranya. Sehingga warga yang telah memiliki bukti kepemilikan lahan, Melakukan pembayar pajak tanah melalui kelurahan pulau tidung, dengan cara staf kelurahan yg turun langsung ke pulau pari dengan membawa surat pajak. Warga di informasikan untuk melakukan pembayaran pajak tanah dan bangunan melalui staf kelurahan.

**Tahun 1985** Staf Kelurahan dari Pulau Tidung, menarik girik asli dan berkas-berkas tanah yang sudah ada, Dengan alasan akan dilakukan pembaharuan dan hingga saat ini girik tersebut tidak di kembalikan. Warga yang pada saat itu sangat percaya dengan Staf Kelurahan tanpa ada kecurigaan apapun memberikan dengan suka rela tanpa adanya tanda terima. Dan selang beberapa tahun kemudian pembayaran PBB di

putus dari Kelurahan. Saat ini beberapa warga masih memilik *fotocopy* pembayaran bukti pajak dan adapula yang asli diantara tahun 1985-1989.

"...antara 1985, ada dua staf kelurahan yakni Mad Safi'I dan Nahrawi meminta girik-girik warga dan bukti-bukti kepemilikan tanah untuk pemutihan. Setelah girik terkumpul, mereka membawanya ke kelurahan dengan menaiki kapal Kartika Bahari. Mad Safii masih saudara saya. Tiba-tiba mendengar kabar bahwa kapal terbakar beserta surat-surat warga. Namun, kami percaya kepada staf desa bahwa nanti akan ada penggantinya..." (Ibu Rohani, 65 th)

Warga tidak membayar Pajak lagi setelah pajak di putus. Karena tidak ada penagihan dari kelurahan dan keinginan warga yang akan membayar pajak di tolak oleh pemerintah desa, maka hal ini yang membuat salah satu konflik antara warga dengan perusahaan. Pemerintah kelurahan berdalih bahwa tanah sudah milik perusahaan dan pajak akan dibayarkan perusahaan. Ketika warga ingin membayar dianggap tidak memiliki kewajiban untuk membayar karena tidak memilik tanah.

"...Setiap tahun Perusahaan membayar Pajak untuk tanah di Pulau Pari kata pihak perusahaan kurang lebih 500 juta. Itu ngakunya perusahaan..." (Samsyul, 45 tahun)

**Tahun 1989** PT. Bumi Raya pertama masuk di Pulau Pari. Dimana pada saat itu Pulau Pari masih bergabung dengan Kelurahan Pulau Tidung. Pada waktu kelurahan dipimpin oleh Lurah Purnomo Subagio mantan Serda AL dan yang menjadi RW Bapak Khaerudin.

Kemudian PT. Bumi Raya melakukan pembelian tanah di Pulau Pari dari tahun 1989-1993 dengan mekanisme jual beli yang diduga Sumir, Intimidatif dan berpotensi melanggar undang-undang pertanahan. Pembelian lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dibantu oleh Bapak H.Amir bin Djamin selaku salah satu Staf Kelurahan aktif pada saat itu.

"...Tanah yang dijual beli itu seharusnya ada diketahui oleh RT, RW ya, tapi saya tidak ada tanda tangan sama sekali, itu yang saya tidak senang dengan H. Amir paman saya itu, dia kayak sembunyi gitu..." (Khaerudin, 68 tahun)

**Tahun 1991** perusahaan memindahkan warga Pulau Pari dari total 90 KK di pindah 16 KK ke Pulau Tidung. Dengan dijanjikan mendapatkan lahan dan bangunan yang layak untuk ditempati di Pulau Tidung. Janji tinggal janji. Dengan rumah yg tidak layak di tempati, sulitnya mendapatkan sumber mata pencarian di Pulau Tidung. Untuk mendapatkan sumber mata pencaharian yang lebih baik, sehingga sebagian warga yang dipindah ke Pulau Tidung kembali pindah ke Pulau Pari. Dikarena kondisi perekonomian di Pulau Pari saat itu masih lebih baik karena adanya budidaya rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat pulau pari yang di bantu oleh LIPI.

**Tahun 1995-1997** masalah sengketa tanah antara perusahaan dan warga, Mendapatkan perhatian dari anggota DPRD Komisi A dan perhatian oleh Gubernur Ali Sadiqin. Akhirnya oleh Pemprov DKI, Pulau Pari dengan Luas 41,32 Ha di bagi 3 zona, yakni 40% pemukiman, 10% PHB/LIPI, dan 50% pengembangan wisata oleh investor. Bahkan juga sudah di petakan oleh dinas tata ruang provinsi.

**Tahun 2008**, sekitar 182 KK menandatangani surat perjanjian warga dengan PLN, Yang disitu isinya warga menyatakan bahwa warga menempati tanah perusahaan. Dan bagi yg tidak mau menanda tangani surat tersebut maka tidak akan di pasangkan

listrik. Dan faktanya pada saat ini setelah dilakukan pengecekan. Pemasangan listrik tersebut terdaftar atas nama warga bukan atas nama perusahaan.

**Tahun 2010**, semua rumah yg berada diutara dari masjid direlokasikan ke selatan, Oleh perusahaan dengan alasan akan di pergunakan. Jumlah rumah yg direlokasi 19 rumah, Dengan biaya ganti rugi Rp2.500.000/rumah. Serta pihak perusahaan membuat tembok untuk pagar diareal areal makam, dilahan yang terdapat Plang SHM perusahaan di RT 02, serta di dekat rumah bapak edi priadi di RT 04.

**Tanggal 30 September 2015**, diadakan mediasi di Pulau Pari, Mediasi dihadiri oleh warga yg didampingi oleh Indonesia Fight Corruption (IFC) yang berasal dari Bekasi, Bupati Budi Utomo, Kapolres, dan beberapa instansi terkait dan perwakilan dari perusahaan. Dengan mendapatkan hasil mediasi lanjutan di gedung Mitra Praja, yg akan di hadirkan oleh pimpinan perusahaan Bapak Pintarso.

**Tanggal 02 Oktober 2015**, dilakukan mediasi ke dua digedung Mitra Praja. Namun bapak pimpinan perusahaan tersebut tidak ikut hadir. Warga dan Indonesia Fight Corruption (IFC) asal Bekasi kecewa sehingga mereka walk out dari pertemuan. Dan mediasi pun tidak membuahkan hasil apapun. Namun pertemuan tetep di lanjutkan dengan warga yg tidak walk out dari gedung Mitra Praja.

**Tanggal 22 Desember 2015**, warga melakukan demonstrasi didepan Istana Negara dan Balai Kota dengan dikordinatori oleh pihak dari Indonesia Fight Corruption (IFC).

**Pada tahun 2015**, sudah keluar master plan pembangunan Pulau Pari oleh perusahaan.

**Pada tanggal 14 Januari 2016**, terjadi pertemuan antara warga dan perusahaan yang di hadiri oleh Bupati dan Kapolres, keluarlah surat kesepakatan antara warga dan perusahaan yang isinya 6 point:

- PT. Bumi Pari Asri sebagai pemilik lahan tidak ada niat penggusuran keluar Pulau Pari terhadap masyarakat asli Pulau Pari yang telah menempati bangunan diatas tanah PT. Bumi Pari Asri yang tercatat dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masyarakat, kecuali yang sedang dalam proses hukum.
- Tanah milik PT. Bumi Pari Asri yang sudah ada bangunan di Pulau Pari tetap tidak ada ekspansi/penambahan luas bangunan dan membangun bangunan baru tanpa perijinan IMB sesuai dengan aturan Perda No. 7/2010.
- PT. Bumi Pari Asri akan membangun hotel dan fasilitas pariwisata untuk menunjang wisata di Pulau Pari, masyarakat berjanji akan mendukung, dan nantinya ada homestay dan ada hotel sebagai pilihan wisatawan/pelancong.
- Homestay/rumah tinggal yang dibangun oleh masyarakat penduduk asli yang sudah ada sesuai surat pernyataan dengan PT. Bumi Pari Asri sebagai pemilik tanah akan mendukung eksistensinya dan kerjasama dengan masyarakat yang syarat-syaratnya akan dibicarakan lebih lanjut selama masyarakat patuh, taat, dan tunduk pada aturan pemda dan hukum yang berlaku.
- Harapan perusahaan bahwa Pulau Pari dibangun PT. Bumi Pari Asri, sedangkan masyarakat berkomitment/wajib mendukung pembangunan oleh PT. Bumi Pari Asri

- Pantai-Pantai di Pulau Pari (Pantai Pasir Perawan, Pantai Kresek, Pantai Bintang) sebagai tempat hiburan/pariwisata dikelola oleh PT. Bumi Pari Asri sebagai pemilik lahan akan bekerja sama dengan masyarakat Pulau Pari, didukung oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata.

Berdasarkan pertemuan tersebut warga meminta SIPPT mohon disesuaikan di lapangan agar tidak ada rumah atau bangunan yg di bongkar atau di gusur. Namun sayang surat kesepakatan itu dibuat secara sepihak oleh perusahaan.

**Tanggal 16 januari 2016**, warga melakukan pertemuan di Pelabuhan Utama Pulau Pari, Dengan agenda tanya jawab perihal surat kesepakatan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan keputusan warga merubah yang 6 point menjadi 5 point:

- Tidak ada penggusuran dan pemindahan bangunan milik masyarakat asli Pulau Pari yang tercatat dalam surat kesepakatan yang telah ditandatangani oleh masyarakat dan pihak dari PT. Bumi Pari Asri dan beberapa saksi pemerintah daerah yang terkait.
- Masyarakat tetap tidak ada ekspansi/penambahan luas bangunan dan membuat bangunan baru tanpa perijinan IMB sesuai dengan aturan perda Nomor 7 tahun 2010. Dengan demikian tanah pemukiman masyarakat berada dalam zona 40% dan dapat di fasilitasi dengan kebijakan oleh pemerintah untuk memperoleh legalitas tanah menjadi hak milik masyarakat.
- Masyarakat akan mendukung untuk pengembangan wisata di Pulau Pari melalui pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata yang dilakukan oleh PT. Bumi Pari Asri dengan menyesuaikan kondisi yang ada tanpa melakukan pemindahan bangunan milik masyarakat.
- Masyarakat akan mendukung eksistensi dan kerjasamanya dengan PT. Bumi Pari Asri selama tidak ada kesenjangan social yang merugikan masyarakat Pulau Pari.
- Pantai-pantai di Pulau Pari (Pantai Pasir Perawan, Pantai Kresek, Pantai Bintang) sebagai tempat hiburan/pariwisata di tindak lanjuti oleh kebijakan pemerintah daerah dengan memberdayakan masyarakat Pulau Pari melalui daya dukung/upaya PT.Bumi Pari Asri.

Namun Perusahaan menolak surat kesepakatan yang dibuat oleh warga dengan alasan tanah Pulau Pari 90% tanah mereka. Dan pada akhirnya bergeraklah perusahaan dengan surat kesepakatan yang mereka buat dengan 7 point:

- PT. Bumi Pari Asri sebagai pemilik lahan tidak ada niat penggusuran keluar Pulau Pari terhadap masyarakat asli Pulau Pari yang telah menempati bangunan diatas tanah PT. Bumi Pari Asri yang tercatat dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masyarakat, kecuali yang sedang dalam proses hukum
- Tanah milik PT. Bumi Pari Asri yang sudah ada bangunan di Pulau Pari tetap tidak ada ekspansi/penambahan luas bangunan, dan membangun bangunan baru tanpa perijinan IMB sesuai dengan aturan Perda No. 7/2010

- PT. Bumi Pari Asri akan membangun hotel dan fasilitas pariwisata untuk menunjang wisata di Pulau Pari, masyarakat berjanji akan mendukung, dan nantinya ada homestay dan ada hotel sebagai pilihan wisatawan/pelancong
- Homestay/rumah tinggal yang dibangun oleh masyarakat penduduk asli yang sudah ada sesuai surat pernyataan dengan PT. Bumi Pari Asri sebagai pemilik tanah akan mendukung eksistensinya dan kerjasama dengan masyarakat yang syarat-syaratnya akan dibicarakan lebih lanjut selama masyarakat patuh, taat, dan tunduk pada aturan pemerintahan RI
- Harapan perusahaan bahwa Pulau Pari dibangun PT. Bumi Pari Asri, sedangkan masyarakat berkomitmen/wajib mendukung pembangunan oleh PT. Bumi Pari Asri. Pantai-pantai di Pulau Pari (Pantai Pasir Perawan, Pantai Kresek, Pantai Bintang) sebagai tempat hiburan/pariwisata dikelola oleh PT. Bumi Pari Asri sebagai pemilik lahan akan bekerja sama dengan masyarakat Pulau Pari, didukung oleh pemerintah daerah dan dinas pariwisata.
- Pembangunan hotel akan disesuaikan dengan keputusan SIPPT. Sudah banyak pertemuan yg dilakukan oleh perusahaan dengan oknum yang mengatas namakan perwakilan warga. Sedangkan sebagian warga tidak merasa diwakili ataupun menunjuk mereka sebagai utusan warga.

**Tanggal 16 Maret 2016**, tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas Security Perusahaan melakukan pengukuran rumah warga.

"...saya tidak terima tanah saya di ukur-ukur oleh orang perusahaan tanpa ijin. Apa tujuannya mereka ngukur tanah saya? Lha RT dan RW-nya saja tidak tahu atau ijin lapor. Diusir mereka sama warga..."(Fadilah, 75 tahun)

**Tanggal 30 Maret 2016**, tanpa alas yang jelas dan tanpa ada pemberitahuan terhadap warga dan Ketua RT dan RW, Perusahaan dan PTSP hendak mengukur tanah warga. Didampingi oleh beberapa aparat kepolisian, satpol PP dan Instansi Kelurahan. Ibu Hapsa dan Bapak Hasanudin sebagai tim PTSP. Namun gagal karena terjadi penolakan oleh banyak warga.

**Tanggal 1 April 2016**, ketua beserta beberapa anggota Forum Peduli Pulau Pari (FPPP) dan warga menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bertemu dengan Bapak Brahmantya Styamurti Poerwadi, S.T sebagai Dirjen Pengolahan Ruang Laut (PRL). Untuk menyampaikan permasalahan yang dialami warga dengan pihak perusahaan.

**Tanggal 20 April 2016**, setelah menunggu lama jawaban dari Komnas HAM akhirnya mendapat jawaban juga. Komnas HAM telah menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), BPN Jakarta Utara, Kapolda Metro Jaya, dan Bupati Kepulauan Seribu.

**Tanggal 25 April 2016**, tim dari Komnas HAM hadir ke Pulau Pari, untuk menindak lanjuti laporan dan surat yang telah Komnas HAM layangkan pada tanggal 20 April 2016 dengan di Ketuai oleh Bapak DR. Otto Nur Abdullah dan beserta 3 orang anggota tim Komnas HAM.

**Tanggal 28 April 2016**, permohonan data tanah Liter C Kelurahan Pulau Pari, namun dengan tidak membuahkan hasil dengan jawaban data yang diminta merupakan data rahasia, dengan Lurah Bapak H. Murta'a.

**Tanggal 11 Mai 2016**, Ketua RW, Ketua RT dan Ketua FPPP mendatangi kantor Pos Pol di Pulau Pari, dengan tujuan pengaduan masalah yang telah dilakukan oleh pihak Perusahaan terhadap warga.

**Tanggal 18 Mai 2016**, *security* perusahaan memasang kembali plang pengakuan kepemilikan tanah perusahaan, namun kali ini dari bahan besi. Namun disertai dengan Undang-undang ancaman pidana.

**Tanggal 22 Juni 2016**, dengan alasan tidak memiliki IMB, salah satu rumah warga bernama Ibu Susi disegel. Yang mana rumah tersebut terbuat dari setengah batu dan bilik bambu. Dengan dasar laporan perusahaan.

**Tanggal 12 Agustus 2016**, Direktur Exskutif Walhi Jakarta, Ketua RT dan RW diundang oleh Bupati Pulau Seribu di Mitra Praja. Membahas apa yang diinginkan oleh warga dan mengharapkan Ketua RT dan RW jangan jadi propokator untuk menentang Perusahaan.

**Tanggal 23 September 2016**, Sulaiman/Surdin mendapat surat undangan dari pihak perusahaan. Dengan agenda akan dilakukan pengukuran batasan tanah/lahan kepemilikan tanah dilokasi RT 01 RW 04 dengan Sertifikat Hak Milik No.253 oleh Perusahaan, yang mana di atas tanah/lahan tersebut ada bangunan penginapan 7 pintu yang telah dibangun oleh Sulaiman/Surdin. Pertemuan dilakukan pada tanggal 30 September 2016 di kantor Perusahaan.

**Tanggal 4 Desember 2016**, Sulaiman/Surdin mendapat surat ke dua dari perusahaan sebagai lanjutan surat di tanggal 23 September 2016 lalu.

**Tanggal 5 Oktober 2016**, warga yang di dampingi oleh tim dari Walhi Jakarta menyurati Kantor Staf Presiden (KSP), dengan tujuan permohonan audiensi.

**Tanggal 17 Oktober 2016**, Walhi Jakarta dan warga memenuhi undangan dari Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai jawaban dari surat yang pernah Walhi Jakarta dan Warga layangkan. Dan bertemu dengan Deputy 2 KSP.

**Tanggal 18 Oktober 2016**, Ketua RW dan RT melakukan rapat warga RW 04 Pulau Pari di halaman terbuka Sekolah Satu Atap Pulau Pari. Bapak Surahman sebagai Lurah Pulau Pari pun terundang namun tidak hadir tanpa memberi alasan apapun. Dengan hasil warga menginginkan diadakan rapat warga lanjutan dengan dihadirkan oleh orang pakar hukum dalam pertanahan.

**Tanggal 29 November 2016**, Sulaiman/Surdin mendapat surat somasi dari pihak perusahaan, tertanggal 28 November 2016, karna menganggap Sulaiman/Surdin tidak mengindahkan surat undangan tertanggal 23 September 2016. Jika selama 3X24 jam Sulaiman/Surdin tidak mengosongkan lahan/tanah SHM No. 253 maka ada ditindak lanjuti upaya hokum, baik pidana atau perdata.

**Tanggal 1 Desember 2016**, Warga yang didampingi oleh Walhi Jakarta memenuhi undangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang di Pimpin oleh Bapak Brahmantya Styamurti Poerwadi, S.T sebagai Dirjen Pengolahan Ruang Laut (PRL). Sebagai lanjutan dari pertemuan tanggal 01 April 2016 yang lalu.

**Tanggal 5 Desember 2017**, Sulaiman/Surdin mendapat kembali surat somasi yang kedua kalinya. Karna ketidak patuhannya terhadap perusahaan. Menanggapi surat dari perusahaan maka KSP membuat surat untuk perusahaan. Tertanggal 05 Desember 2016.

**Tanggal 10 Januari 2017**, kembali Sulaiman/Surdin mendapat surat somasi ke tiga kalinya, yang tertanggal 04 Januari 2017. Tindak lanjut surat somasi tertanggal 05 Desember 2017.

**Tanggal 18 Januari 2017**, kembali Sulaiman/Surdin mendapat surat somasi pengosongan rumah yang keempat kalinya, tertanggal surat 11 Januari 2017. Tindak lanjut surat somasi perusahaan tanggal 04 Januari 2017. Tertanggal surat 11 Januari 2017.

Selama 2016, banyak intimidasi yang di alami oleh warga. berdasarkan surat kesepakatan dan surat edaran dari perusahaan untuk warga yang bersifat intervensi dan intimidasi. Sudah hampir 40% warga yg sudah menanda tangani surat kesepakatan yang di buat oleh perusahaan, Namun seiring berjalannya waktu, Warga yang menandatangani merasa tertipu dan terpaksa dalam menandatangani surat tersebut.

**Tanggal 20 Maret 2016**, perusahaan membentuk satu koperasi, dengan pengurusan koperasi tersebut banyaknya orang-orang perusahaan. Karna Dana simpanan wajib dan pokok koperasi itu sendiri dari perusahaan. Dan koperasi itu di beri nama Koperasi Pari Jaya Bersama. Koperasi dengan jenis koperasi primer.

**Tanggal 28 Maret 2016**, perusahaan melakukan pengukuran rumah-rumah warga secara sepihak. Yang melaksanakan pengukuran security dan orang perusahaan. Namun kali ini ditolak oleh warga karna tidak adanya pemberitahuan kepada Ketua RT dan RW.

Menurut pemaparan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disampaikan bahwa sejumlah 60 pulau di wilayah Kepulauan Seribu telah dikuasai oleh privat/swasta (Utomo 2015). Modus-modus tersebut baik dari ketiga cara penguasaan yang dilakukan oleh privat dan swasta diperuntukkan sebagai pulau resort atau wisata bahari yang dikelola oleh swasta. Selain itu, penguasaan oleh privat juga diperuntukkan sebagai pulau tinggal/peristirahatan yang diperuntukkan bagi keluarga penguasa pulau tersebut (detail penguasaan pulau pada *Lampiran*).

## **STRUKTUR, KETIMPANGAN LOKAL, DAN TATA-GUNA SUMBER AGRARIA PULAU**

### **Struktur Agraria dan Ketimpangan Lokal**

Masyarakat di Kepulauan Seribu mempunyai kekerabatan yang cukup kuat. Pada awalnya sebelum terdapat kapal transportasi umum reguler yang menghubungkan antar pulau ataupun pulau dengan darat/Jakarta, masyarakat Kepulauan Seribu melakukan perkawinan (kawin-mawin) dengan penduduk pulau itu sendiri atau penduduk antar pulau di wilayah Kepulauan Seribu.

Corak produksi masyarakat Kepulauan Seribu masih dominan sebagai nelayan. Pelapisan sosial di Kepulauan Seribu, terbagi menjadi dua (2) kategori, yaitu pelapisan oleh fungsi sosial di masyarakat dan pelapisan atas dasar alat produksi-sarana yang dimiliki. Pelapisan sosial pertama terdiri dari 1) lapisan warga agamawan, yaitu masyarakat yang secara fungsi menjadi tokoh agama (khususnya Islam); 2) pejabat pemerintahan-kelurahan; dan 3) masyarakat biasa. Selanjutnya, pelapisan yang kedua dibentuk atas dasar kepemilikan faktor produksi-sarana tangkap nelayan.

Nelayan dibagi menjadi nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Nelayan budidaya, membudidayakan ikan laut yang telah didomestikasi melalui lembaga pengembangan perikanan. Alat produksi dan sarana tersebut menciptakan kategori ragam dan jenis pekerjaan masyarakat. Pelapisan tersebut antara lain adalah 1) *pelele* (tengkulak ikan); 2) nelayan/pemilik perahu; 3) nelayan tangkap dan/atau budidaya; 4) buruh tangkap ikan; dan 5) kuli yang terdiri dari kuli panggul dermaga dan pengecer barang dari dermaga menuju warung-warung atau rumah masyarakat.

Di Pulau Pari, nelayan dibedakan menjadi dua jenis yaitu nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Jenis nelayan menjadi indikator yang menunjukkan status sosialnya. Contohnya nelayan budidaya kerapu masuk dalam strata sosial tinggi di dalam masyarakat Pulau Pari sejajar dengan *pelele*. Nelayan budidaya ikan kerapu tergolong dalam strata atas dalam pelapisan nelayan Budidaya. Di karenakan tidak semua nelayan mampu secara ekonomi mengembangkan ikan budidaya ini. Ikan kerapu membutuhkan pakan ikan segar setiap hari yang harus disediakan oleh nelayan. Minimal Modal untuk bibit sekitar Rp35.000/ekor. Biasanya untuk memperoleh untung harus membudidaya minimal 100 ekor. Rata-rata biaya produksi minimal Rp10an juta (perawatan, pakan ikan segar, dan transportasi). Melihat hal tersebut tidak semua nelayan mampu budidaya ikan kerapu. Selain Budidaya ikan kerapu, ada juga budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut adalah pelapisan kedua dalam jenis nelayan budidaya. Rata-rata nelayan hanya membutuhkan maksimal Rp1.000.000 untuk budidaya rumput laut. Selain Nelayan Budidaya kerapu, nelayan yang masuk pelapisan sosial atas adalah *pelele*, pemilik moda transportasi dari muara angke ke pulau pari, pemilik toko sembako besar, dan memiliki *homestay*.

*Pelele* memiliki memiliki keterikatan yang erat membawahi nelayan tangkap sampai ke ABK. Bahkan *Pelele* menjadi ikatan ketergantungan bagi nelayan tangkap, yakni pada pada saat paceklik terkadang mereka memberi talangan dana dan bantuan. Nelayan tangkap juga melakukan diversifikasi pekerjaan, ketika di hari wisata (Sabtu dan minggu) terkadang mereka menyekan perahunya untuk mengantar wisatawan atau istilahnya *ojeg* nelayan.

Wisata bahari saat ini di Kepulauan Seribu mempunyai peran dan posisi alternatif sekaligus penting bagi masyarakat. Jasa wisata membentuk stratifikasi baru di dalam masyarakat. Pembentukan stratifikasi lebih dipengaruhi oleh faktor produksi yang mampu disediakan oleh masyarakat. Pemilik penginapan memiliki keterikatan dengan penyedia catering, penyewaan sepeda dan jasa snorkeling. Namun pada saat ini, beberapa penginapan telah menguasai dari penyediaan catering sampai snorkeling. Pemandu wisata adalah tingkatan terbawah pada rantai pelapisan sosial jasa wisata.

### **Tata Guna Sumber Agraria Pulau**

Menurut kebijakan pengembangan Kepulauan Seribu didorong ke dalam tiga pembangunan yang bertujuan untuk: 1) meningkatkan kegiatan pariwisata; 2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut; dan 3) pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang dan mangrove. Secara tata-guna, pulau-pulau di wilayah Kepulauan Seribu terbagi menjadi enam (6), yaitu: 1) pulau pemukiman; 2) pulau wisata; 3) pulau penghijauan; 4) pulau cagar alam; 5) pulau cagar budaya; 6) pulau peruntukan khusus

(Utomo 2015) (Contoh tata guna pulau pada **Kotak 5**). Jumlah Pulau di Kepulauan Seribu adalah 110 Pulau dengan rencana pengembangan:

1. 11 Pulau Pemukiman
2. 45 Pulau Wisata
3. 26 Pulau Penghijauan
4. 3 Pulau Cagar Budaya
5. 4 Pulau Peruntukan Khusus
6. 4 Pulau yang tenggelam

### **Kotak 5**

#### Tata Guna Wilayah Pulau Panggang

Pulau Panggang menurut peraturan Pemerintah Daerah (Pemda) adalah tanah pemukiman. Pulau Panggang tergolong pulau dengan kepadatan yang cukup tinggi. Wilayah daratan di Pulau Panggang saat ini telah banyak mengalami pelebaran, yaitu melalui reklamasi daratan secara buatan yang diusahakan oleh masyarakat setempat.

Dominan wilayah darat Pulau Panggang diperuntukkan sebagai rumah tempat tinggal dengan status kepemilikan hak milik atau istilah masyarakat adalah tanah adat. Sedangkan wilayah perairan masyarakat terbagi menjadi tiga (3) wilayah, yaitu: 1) wilayah penangkapan ikan, 2) wilayah budidaya, dan 3) wilayah area pelestarian lingkungan (APL). Wilayah APL merupakan hasil kesepakatan oleh masyarakat atas berkurangnya ketersediaan ikan di Pulau Panggang.

Selanjutnya kepemilikan dan/atau penguasaan wilayah laut ditentukan dengan faktor produksi. Siapapun warga yang memiliki faktor produksi yang besar maka akan memiliki jangkauan penguasaan/pengelolaan wilayah laut yang luas. Pada awalnya wilayah perairan-laut merupakan wilayah tangkapan ikan. Tetapi perkembangan selanjutnya wilayah perairan-laut menjadi wilayah budidaya rumput laut dan saat ini budidaya ikan keramba. Pengaturan luasan pengelolaan dan penguasaan tidak diatur dalam kelembagaan masyarakat. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa luasan pengelolaan ditentukan dari kemampuan (faktor produksi) masyarakat dalam mengelola perairan-laut. Sehingga sudah dipastikan, masyarakat yang mempunyai faktor produksi yang relatif besar akan menguasai dan mengelola perairan-laut lebih luas.

## **POLA USAHA DAN ALAT PRODUKSI MASYARAKAT PULAU**

Jenis ikan utama yang didapatkan nelayan di Kepulauan Seribu tergantung pada alat tangkap dan wilayah tangkapan ikan. Pada umumnya jaring tangkap terdiri dari jaring *muroami* (dengan ikan tangkapan ikan ekor kuning); jaring *tegur darat* (dengan ikan tangkapan ikan lele, kakak tua, kacang-kacang/cendro, kerapu, linggis, dan kea-kea); dan jaring *payang* (dengan ikan tangkapan jenis ikan kembung).

Alat tangkap lain yang biasa digunakan nelayan jaring dan bubu. Jenis ikan utama yang didapatkan jika menggunakan jaring adalah ikan tongkol dan kerapu, sedangkan

bubu adalah ikan bronang. Selain alat tangkap, wilayah tangkap juga menentukan jenis ikan yang didapatkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat empat bagian wilayah tangkap yang dikunjungi nelayan Pulau Panggang untuk menangkap ikan sehari-hari, yaitu wilayah utara, selatan, barat, dan timur dari Pulau Panggang. Cara penghidupan masyarakat atau corak usaha di masyarakat terbagi menjadi beberapa. Yaitu: 1) Nelayan; 2) jasa transportasi antar pulau dan wilayah pulau dan darat/Jakarta; 3) usaha perdagangan melalui pertokoan dan pedagang keliling; 4) jasa pariwisata; 5) pegawai negeri dan swasta; 6) buruh nelayan; serta 7) pengepul ikan atau *pelele*.

Nelayan merupakan corak usaha dominan penduduk masyarakat. Nelayan dibagi menjadi nelayan ikan tangkap dan nelayan ikan budidaya. Nelayan ikan tangkap terdiri dari nelayan ikan konsumsi dan nelayan ikan hias. Nelayan ikan tangkap rata-rata memiliki alat produksi dari jaring hingga kapal motor. Kepemilikan jenis kapal motor berpengaruh pada jumlah tenaga kerja yang direkrut dalam penangkapan ikan di laut. Kapal motor kecil pada umumnya terdiri dari dua (2) hingga tiga (3) tenaga kerja, yaitu 1) pemilik kapal sekaligus sebagai operator atau pengendara kapal motor; 2) tenaga kerja penangkap dan penebar jaring ikan. Sedangkan nelayan dengan kapal sedang pada umumnya memiliki tenaga kerja sebanyak empat (4) hingga enam (6) orang.

Cara perhitungan pembagian hasil tangkap adalah: 1) hasil tangkapan dibagi menjadi A dan B. A adalah biaya bahan bakar serta akomodasi selama waktu melaut, termasuk perhitungan biaya sewa kapal dan alat tangkap jaring. Hasil tangkap A setelah dipenuhi selanjutnya adalah pembagian untuk B. Pembagian hasil B yaitu dibagi secara rata antara personel semua tenaga kerja saat melaut.

Dari waktu ke waktu alat produksi khususnya kapal/perahu dan jaring tangkap berubah-ubah. Dalam perkembangannya, alat tangkap nelayan berupa pancing, bubu bambu/kayu, jaring tangsi, potasium, jaring *muroami*, bubu kawat, sonar ikan, jaring thailand-jaring nilon, hingga tombak mandarin. Sedangkan sarana kapal/perahu yang digunakan oleh nelayan berkembang dari perahu layar, perahu motor kecil, hingga perahu motor sedang-besar. Perkembangan alat tangkap dan sarana kapal/perahu dilatar belakangi oleh ketersediaan ikan yang ditangkap. Hal ini berlaku baik untuk ikan konsumsi dan ikan hias. Berikut di bawah adalah tabel perubahan alat tangkap pada nelayan (**Tabel 2**).

**Tabel 2**

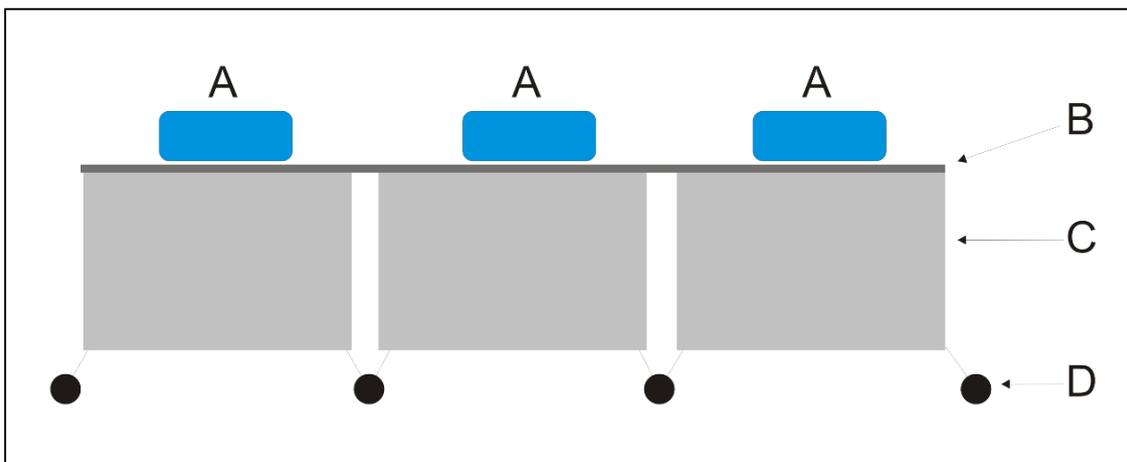
Perkembangan dan perubahan alat tangkap nelayan

Jenis alat tangkap	Tahun				
	1970an	1980an	1990an	2000an	2010an
Pancing	v	v	v	v	v
Bubu bamboo/kayu	v	v	v	v	v
Jaring tangsi	v	v	v	v	v
Potasium		v	v	v	v
Jaring <i>muroami</i>			v	v	v
Bubu kawat				v	v
Sonar ikan				v	v
Jaring thailan dan nilon				v	v
Tombak mandarin					v
Kapal layar	v	v			
Kapal motor kecil			v	v	v

Jenis alat tangkap	Tahun				
	1970an	1980an	1990an	2000an	2010an
Kapal motor sedang-besar			v	v	v

Selanjutnya, perubahan alat tangkap pada nelayan tangkap ikan hias secara umum terjadi tiga (3) kali perubahan, yaitu dari jaring kecil penangkap ikan hias/pancingan, semprotan potassium, dan jaringan ikan hias/pancingan. Nelayan ikan budidaya sangat bergantung pada kemampuan dan kepemilikan keramba. Keramba yang dimiliki oleh nelayan budidaya merupakan keramba jaring/kelambu yang menjadi dinding-dinding keramba yang melaket pada kerangka dasar keramba. Masyarakat membuat kerangka keramba dari dua jenis bahan, yaitu kayu/bambu dan/atau besi.

*Pelele*/tengkulak ikan tangkap dan ikan budidaya rerata mempunyai faktor produksi perahu atau kapal motor dari kapal motor kecil hingga kapal motor sedang. Di samping itu juga, *pelele* juga sekaligus sebagai nelayan tangkap dan budidaya. Hal ini terjadi karena *pelele* relatif mempunyai kemampuan dan daya usaha yang lebih besar daripada nelayan tangkap atau budidaya. Ikan hasil pengumpulannya baik dari usaha tangkap/budidaya dan dari nelayan yang lain dibawa ke pulau lain, seperti Pulau Pramuka dan Tidung atau dibawa/dijual ke darat/Jakarta dengan menggunakan kapal besar dengan sistem sewa tempat. Selanjutnya *pelele* ikan hias menjual ikan hias di darat dengan menggunakan kapal besar/penumpang yang regular dari pulau ke darat/Jakarta.



**Gambar 2** Ilustrasi keramba nelayan ikan budidaya

Keterangan: A = pelampung keramba yang terbuat dari drum plastik dan atau seng.  
 B = kerangka keramba yang terbuat dari besi atau bamboo/kayu. C = keramba yang terbuat dari jaring/kelambu. D = pemberat keramba yang terbuat dari besi atau batu.

Hubungan *pelele* dan nelayan cukup kuat. Hubungan ini terjalin karena adanya ketergantungan antara nelayan tangkap/budidaya dan *pelele*. Pengaruh dan peran *pelele* terhadap nelayan budidaya/tangkap secara garis besar terdiri dari 1) pemberian modal atau pinjaman; 2) pemilihan alat tangkap/sarana budidaya; 3) penentuan harga ikan; dan 4) penentuan jumlah hasil tangkapan/panen. *Pelele* akan memberikan modal dan/atau pinjaman khususnya pada alat-alat tangkap. Alat tangkap berupa jaring, kompresor, bekal di laut atau ransum dan bekal keluarga nelayan tangkap di saat melaut. Tidak sedikit ranah pinjaman juga diberikan dalam urusan-urusan keperluan rumah tangga, yaitu seperti pinjaman untuk membangun rumah, biaya anak sekolah dan

kesehatan. Pada nelayan ikan budidaya, mendapatkan pinjaman untuk keperluan biaya sehari-hari keluarga dan pinjaman untuk bibit, pakan dan pembangunan keramba.

Perkembangan alat tangkap dilatar-belakangi oleh faktor ketersediaan ikan dan diperkenalkan oleh *pelele* dan *toeke*. Fungsi *pelele* yang cukup penting adalah mengumpulkan ikan dari nelayan. *Pelele* mendapatkan setoran ikan dari nelayan dan pula mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga ikan. Tentunya di dalamnya akan terjadi negoisasi antara *pelele* dan nelayan. Tetapi, sebagian besar informasi terkait pasar lebih dikuasai oleh *pelele*. Hal inilah yang menjadikan asimetri informasi dan *pelele* mempunyai kekuatan dalam menentukan harga.

**Tabel 4**

Jenis alat tangkap dan jenis tangkapan nelayan

Jenis Alat Tangkap		Jenis Tangkapan
Pancing Ulur	- Kail no. 7 dan Senar no. 500	- Kerapu (lodi, lumpur, macan, bebek, hybrid), Tongkol, Pari, Sunu, Ikan karang, Kembung, Temban
	- Kail no. 8-9 dan senar no. 200	- Layur, tenggiri, Selar, Layang
Bubu	- Lubang jaring 1 inci dan ukuran luas 3 m <sup>2</sup>	- Kerapu (lodi, lumpur, macan, bebek, hybrid), ikan karang
Jaring Poncot	- Mata Jaring ukuran 2 inc	- Ikan Karang dan Ikan Hias
	- Mata Jaring ukuran 4-6 inc	- Layur Ikan berukuran besar
Jaring <i>Muroami</i>		- Ekor Kuning, Ikan Kue, Kakak Tua, Lape, Magong, dan jenis ikan ruca-ruca (ikan pakan budidaya)

Nelayan di Pulau Panggang memiliki karakteristik yang beragam. Perbedaan yang jelas terlihat dari setiap nelayan di Pulau Panggang antara lain perbedaan alat tangkap, jenis tangkapan ikan, wilayah tangkap, dan sebagainya. Terdapat tiga jenis alat tangkap yang biasa digunakan nelayan Pulau Panggang untuk menangkap ikan, meliputi jaring, bubu (dapat dilihat pada **Tabel 4**), dan pancing. Jaring dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu jaring *muroami*, jaring tegur darat, jaring payang, dan jaring tebak. Bubu juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bubu darat (untuk laut dangkal) dan bubu tengah (untuk laut dalam).

Jenis tangkapan ikan yang paling banyak didapat jika menggunakan jaring *muroami* adalah jenis ikan ekor kuning. Jaring *muroami* biasa disebut dengan jaring kongsi oleh masyarakat Pulau Panggang. Jaring *muroami* adalah hasil adopsi dari Negara Jepang saat jaman penjajahan Indonesia. Penggunaan jaring *muroami* dapat dilakukan dengan jumlah tenaga kerja minimal lima orang. Usaha jaring *muroami* di Pulau Panggang biasanya terdiri dari 12 hingga 24 orang pekerja. Penggunaan jaring *muroami* biasa diterapkan di daerah Utara dari Pulau Panggang, yaitu daerah karang, Pulau Kotok, Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Semut, dan Pulau Sebira (jarak diatas 5-10 mil). Pembagian hasil tangkapan dilakukan setelah menjual hasil tangkapan dengan dua pilihan penjualan, yaitu menjual pada pemilik usaha dan menjual pada pengepul di Muara Angke. Pembagian kerja nelayan *muroami* biasa diterapkan setelah menjual ikan, dan

dipotong biasa ransum – bahan bakar. Cara bagi hasil adalah adalah satu bagian untuk pemilik kapal, satu bagian untuk juragan (nahkoda) pemilik kapal ikut juga menjadi nahkoda, satu bagian untuk jaring pemilik alat tangkap, satu bagian untuk ABK.

Penggunaan jaring *muroami* saat ini mulai diawasi dengan ketat oleh pemerintah Kota Jakarta. Pelarangan *muroami* sebenarnya karena praktiknya nelayan di Pulau Panggang bersamaan dengan penggunaan kompresor. Patroli sering diadakan pihak pemerintah untuk menindaklanjuti nelayan yang menggunakan jaring *muroami* dan kompresor. Nelayan yang tertangkap menggunakan *muroami* dan kompresor akan diberi sanksi berupa penahanan Surat Izin Melaut hingga penahanan jaring dan kapal. Penggunaan alat bantu kompresor dilarang karena pertama membahayakan dan yang kedua adalah cenderung manipulatif dengan menggunakan alat bius atau potasium. Pada zaman Jepang dahulu, nelayan menangkap tanpa menggunakan kompresor, tapi saat ini mereka menggunakan kompresor.

Penggunaan jaring tegur darat atau disebut jaring *poncot* juga memerlukan tenaga kerja berjumlah lebih dari satu orang. Jumlah tenaga yang biasa dibutuhkan untuk penggunaan jaring tegur darat di Pulau Panggang adalah sebanyak tiga hingga enam orang tenaga kerja. Jenis tangkapan ikan yang biasa didapatkan dalam penggunaan jaring tegur darat, antara lain ikan lencam, ikan kakak tua, ikan kacang-kacang atau ikan cendro, ikan kerapu, ikan lingkis, dan ikan kea-kea. Sistem bagi hasil yang diterapkan pemilik usaha, meliputi dua bagian untuk pemilik usaha, satu bagian untuk perawatan jaring, satu bagian untuk ABK, dan uang tambahan bagi penyelam sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 tergantung hasil tangkapan. Penggunaan jaring tegur darat atau jaring *poncot* dilarang karena praktiknya juga menggunakan alat selam seperti nelayan *muroami*.

Jenis jaring lain yang memerlukan tenaga kerja lebih dari satu orang adalah jaring payang. Penggunaan jaring payang membutuhkan tenaga kerja sebanyak tiga hingga lima orang. Jenis ikan yang utama didapatkan dalam penggunaan jaring payang adalah ikan kembung. Jenis jaring payang adalah jenis jaring tertua dari antara jaring lainnya di Pulau Panggang. Jumlah pengguna jaring payang saat ini telah semakin sedikit. Hal tersebut terjadi dikarenakan wilayah tangkap yang sesuai dengan jaring payang telah dipadati dengan kapal-kapal besar milik perusahaan tertentu atau alat tangkap nelayan jawa yang menggunakan garden atau trawl. Jaring payang nelayan akan tersangkut pada kapal-kapal besar hingga terbawa. Hal tersebut menyebabkan hasil tangkapan ikan nelayan menurun, sehingga nelayan jaring payang beralih menggunakan jaring lain.

Nelayan Pancing biasanya mereka bekerja dalam setiap perahu 1-2 orang. Nelayan pancing melakukan penangkapan biasanya antara 3-4 mil dari pantai. Sistem bagi hasil nelayan pancing biasa satu untuk pemilik perahu, dan hasilnya dibagi pemancing. Nelayan pancing berbeda dengan nelayan menggunakan jaring dan bubu. Mereka melakukan penangkapan ikan mengikuti arah arus. Karena kondisi ikan yang sekarang sudah mulai sedikit pada jarak 3-4 mil, maka nelayan membuat rumpon. Rumpon lebih di pilih nelayan sebagai alternatif karena ikan akan berkumpul pada rumpon. Selain itu, rumpon lebih menghemat biaya transportasi dilaut, karena ikan saat ini area fishing ground berpindah lebih jauh dari biasanya. Hasil memancing satu hari biasanya nelayan mendapatkan maksimal 10-15 kg ikan campur, dan kadang juga sampai tidak mendapatkan ikan tangkapan karena pengaruh cuaca.

Pada penyediaan jasa wisata, alat-alat dan sarana produksi yang dibutuhkan adalah: 1) alat snorkeling; 2) alat selam; 3) transportasi perahu; 4) jasa pemandu wisata; 5) katering; 6) penginapan/homestay; dan 7) paket tambahan seperti perlengkapan dan bahan untuk menanam terumbu karang. Penguasaan jasa pariwisata sangat lekat dari penguasaan mayoritas dan jejaring penyedia jasa wisata. Seperti yang terjadi di wilayah Pulau Harapan dan Kelapa, bahwa jasa penginapan dan alat selam dan snorkeling dikuasai oleh beberapa orang. Hal ini berakibat pada penguasaan pasar wisata. Selanjutnya, sarana transportasi antar pulau dimiliki oleh nelayan-nelayan, tetapi atas penguasaan alat-alat yang lain dan jasa penginapan maka sebenarnya penguasaan terhadap pasar wisata dimiliki oleh pihak-pihak yang mampu menyediakan.

### Alternatif Usaha Wisata Bahari

Pariwisata di Kepulauan Seribu dimulai pada awal tahun 1970an (Mujiyani *et al.* 2002). Awal usaha wisata bahari dimulai dan dibukanya Pulau Putri sebagai resort. Pasca pembukaan Pulau Putri sebagai resort, banyak menyusul di pulau-pulau lainnya. Awal tahun 1990, kepulauan seribu sebagai destinasi wisata mulai dikukuhkan oleh Perda No.11/1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu. Wisata yang dikembangkan pada mulanya adalah wisata resort, dan wisata yang dikembangkan oleh masyarakat atau wisata pemukiman belum berkembang. Tahun 1998, usaha wisata bahari mulai dibuka oleh masyarakat, khususnya di Pulau Untung Jawa. Tetapi tidak lama berselang, Pemerintah Daerah menertibkan wisata pemukiman dengan alasan tidak sesuai dengan peruntukan, di mana Pulau Untung Jawa sebagai pulau pemukiman.

Usaha wisata ini mulai masif terjadi pada awal tahun 2000an. Masifnya wisata bahari ditandai dengan beroperasinya transportasi reguler darat DKI Jakarta ke Kepulauan Seribu. Wisata bahari yang dikembangkan oleh masyarakat Pulau Untung Jawa merupakan wisata berbasis masyarakat/pemukiman pertama di wilayah Kepulauan Seribu. Tetapi dari beberapa penuturan warga dan literatur yang ada (seperti Mujiyani *et al.* 2002) bahwa di pulau-pulau utara seperti Pulau Panggang/Pramuka telah dibuka juga wisata bahari oleh masyarakat. Pada tahun 2003, masyarakat Pulau Panggang dan Pulau Pramuka bekerjasama dengan perguruan tinggi, yaitu lembaga penelitian P4W-IPB beserta Suku Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, membentuk dua kelompok usaha, yaitu budidaya laut dan pariwisata. Pembentukan dua kelompok ini merupakan usaha untuk menciptakan penghasilan alternatif masyarakat selain menjadi nelayan tangkap.

Tahun 2004, masyarakat Pulau Pramuka memulai aktivitas wisata sesuai dengan konsep yang telah disepakati bersama. Kelompok pariwisata di Pulau Pramuka menggagas konsep ekowisata. Masyarakat bersama lembaga penelitian dan dinas menyusun beberapa aturan untuk mendukung konsep ini. Masyarakat mewajibkan setiap pengunjung untuk menanam karang dan bakau. Penanaman karang dan bakau ini memiliki 2 jenis paket (paket wisata yang saat ini berjalan sebagaimana pada **Kotak 6**), yaitu: 1) *for fun*: hanya menanam dan 2) *adopsi*: menanam dan merawat (wisatawan diberikan informasi perkembangan karang dan tanaman yang diadopsinya oleh pengelola). Sayangnya konsep ini hanya berlaku sampai tahun 2007. Masyarakat akhirnya kompromi dengan wisatawan, lebih memilih mass tourism. Wisatawan tidak lagi diwajibkan untuk menanam karang dan bakau. Akhirnya, yang menjadi prioritas adalah

mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, walaupun tanpa batas-batas yang jelas untuk menjaga kondisi alam, seperti yang dilakukan pada awal rencana dan penerapannya.

### **Kotak 6**

#### Paket wisata

Umumnya wisatawan yang berlibur ke kepulauan seribu menggunakan paket yang telah disiapkan oleh agen travel. Berikut ini adalah isi paket yang umum di kalangan agen travel:

1. Transportasi kali adem – pulau seribu (PP)
2. Home stay
3. Makan 3x
4. Kapal snorkling
5. Kapal jelajah pulau
6. Alat snorkeling
7. Kamera underwater
8. Tour guide
9. Barbeque
10. Welcome drink
11. Asuransi jasaraharja selama liburan

Biasanya, peserta travel rata-rata 8–10 orang. Biaya paket biasa, Rp400.000/orang. Pengusaha travel mendapatkan keuntungan minimal Rp500.000. Untuk menengah ke atas Rp1.600.000/orang. Pengusaha travel bisa dapat keuntungan lebih dari Rp3.000.000. Paket antara yang biasa dan menengah sama, yang membedakan adalah paket menengah ke atas tinggalnya di pulau pribadi seperti Pulau Genteng Kecil (kepemilikan Adam Malik), Genteng Besar (kepemilikan Ismail), Bira (kepemilikan PT. Pata Rajasa), tarifnya mencapai Rp1.100.000/malam), dan Pulau Bintang (kepemilikan Beni Sumampao dengan tarif Rp1.210.000/malam).

Para agen travel bekerjasama dengan warga lain sebagai pemilik fasilitas yang akan digunakan. Tarif dari fasilitas tersebut diantaranya:

1. Kapal Rp500.000/hari dan Rp700.000/2 hari
2. Snorkeling Rp25.000/set
3. Kamera under water Rp200.000/hari
4. Diving
5. Pemandu Rp500.000/2x turun
6. Alat Rp350.000/2x turun
  - a. *Banana boat* Rp35.000/orang
  - b. *Home stay* Rp400.000 hingga Rp900.000/hari (kapasitas besar/kecil)
  - c. *Guide* Rp300.000/2 hari

d. *Barbeque* Rp15.000/orang

Di Pulau Pramuka, terdapat ada juga wisata pancing. Tarif paket untuk wisata ini yaitu:

1. Rp5 juta/24 jam yaitu kapal nelayan biasa ukuran 15 x 2,9 m
2. Rp10 juta/24 jam yaitu kapal dengan fasilitas lengkap, full AC. Ukurannya sama dengan kapal nelayan biasa

Jumlah wisatawan mancing per kapal biasanya 4-5 orang. Mereka membawa makanan sendiri. BBM ditanggung *guide*. Pembagian hasilnya, setelah dikurangi dengan biaya BBM (Bahan Bakar Minyak), hasil dibagi 3, yaitu: pemilik kapal (jika dia ikut), ABK, dan kapal itu sendiri. BBM yang dipakai adalah solar (50–100 liter solar per perjalanan). Harganya saat ini Rp8.000/liter. Jumlah ABK biasanya 4 orang. Jumlah pengusaha *guide* travel pancing di pulau pramuka ada 10 orang.

Penginapan para wisatawan dengan konsep *homestay*, awalnya dimaksudkan sebagai rumah warga yang memberikan jasa penginapan bagi wisatawan. Wisatawan tersebut tinggal bersama pemilik rumah. Berbeda dengan sekarang, warga membangun rumah penginapan atau umum disebut *homestay* yang diperuntukkan khusus bagi wisatawan. Menurut salah satu penggerak awal wisata di Pulau Pramuka, *homestay* yang ada sekarang tidak lagi menyerupai *homestay*, tapi lebih menyerupai villa.

Konsep *homestay* yang diberlakukan di awal ini setidaknya menjawab kegelisahan warga yang khawatir dengan daya rusak wisata terhadap nilai kebudayaan dan agama yang dianut kuat oleh masyarakat. Karena dengan tinggal bersama dengan pemilik rumah, masyarakat bisa mengawasi langsung (secara tidak langsung juga mengontrol) wisatawan yang tinggal di rumahnya. Misalnya, beberapa masyarakat khawatir dengan para wisatawan yang bukan suami-istri, tinggal di atap yang sama. Selain itu, masyarakat juga khawatir dengan pakaian “tidak sopan” yang dipakai oleh wisatawan. Kekhawatiran semacam ini terjadi di seluruh pulau wisata berbasis pemukiman di kepulauan seribu, khususnya oleh kalangan orang tua.

## PETA KERUSAKAN EKOSISTEM DAN KRISIS AGRARIA

### Periodisasi Kerusakan Ekosistem

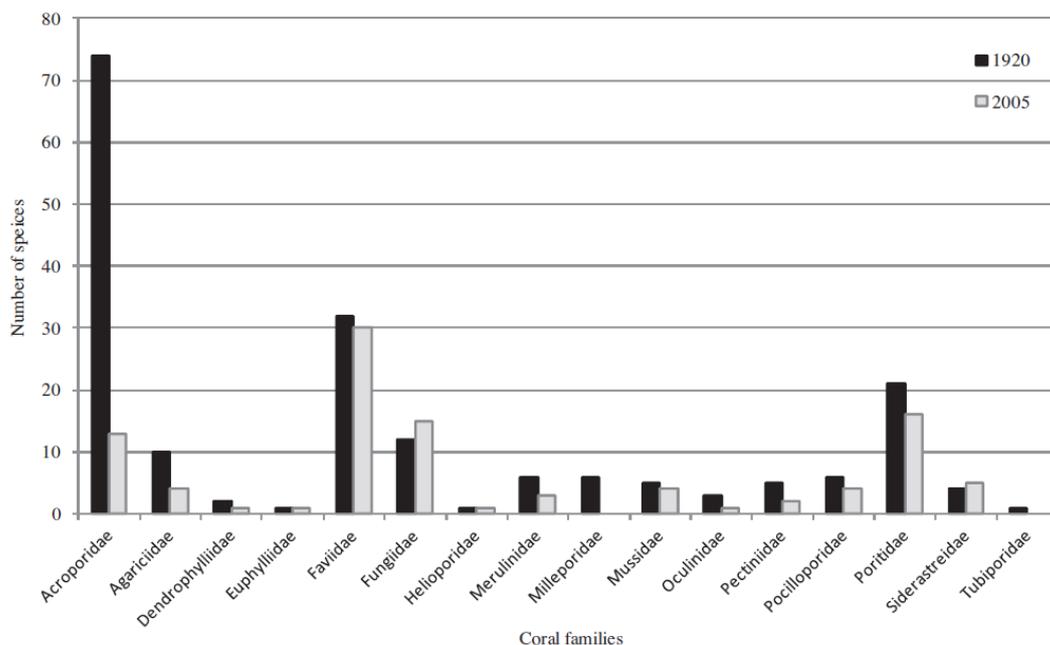
Penyebaran pulau di Kepulauan Seribu yang cukup luas dan menyebar, memungkinkan adanya perbedaan penyebab-penyebab dan waktu-waktu kerusakan yang terjadi di wilayah kepulauan. Walau demikian, setidaknya ada dua pembagian wilayah yang bisa menjadi patokan pembeda yang jelas, yaitu antara wilayah utara dan selatan.

Kerusakan ekosistem di wilayah selatan Kepulauan Seribu banyak disebabkan oleh pencemaran dari daratan, khususnya 13 muara di Jakarta dan sekitarnya (Sachoemar 2008; Estradivari *et al.* 2009); tumpahan minyak dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di pantai-pantai Jakarta (Sachoemar 2008); dan penambangan karang dan penangkapan

ikan (van der Meij *et al.* 2010). Inilah kemudian yang banyak berpengaruh pada rusaknya karang yang ada di perairan kepulauan ini.

Di wilayah utara, tumpahan/buangan minyak dari utara Kepulauan Seribu menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan karang (Hutomo dan Djamali 1978; Sachoemar 2008). Selain itu, aktivitas penambangan karang oleh masyarakat untuk kebutuhan membangun rumah, juga menjadi penyumbang hancurnya ekosistem laut (Mujiyani *et al.* 2002). Aktivitas pariwisata juga banyak menyumbang kerusakan ekosistem, khususnya karang, yang cukup mengkhawatirkan. Aktivitas pariwisata seperti snorkling dan menyelam, mempunyai potensi daya rusak yang akan terus meningkat, jika tidak segera diwaspadai dan diatasi. Rusaknya karang karena aktivitas wisata ini disebabkan banyaknya wisatawan yang menginjak karang ketika mereka snorkling atau menyelam, khususnya penyelam pemula. Cara pemandu untuk memarkir kapal ketika mengantar wisatawan, juga menjadi faktor penting yang akan menjadi ancaman bagi kelestarian karang. Umumnya, pemandu lokal melempar begitu saja jangkar ke karang untuk memarkir kapalnya. Hanya beberapa pemandu yang memarkir kapal dengan mengikat langsung kapalnya ke karang besar, sesuai dengan cara yang dianjurkan agar tidak merusak karang.

Baik nelayan maupun pemandu wisata menuturkan bahwa kondisi karang di wilayah utara jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah selatan. Semakin ke selatan, kondisi karang semakin banyak yang rusak. Hal ini karena wilayah selatan lebih banyak mendapatkan kiriman materi kimia/pencemaran dari daratan. Sebagaimana yang dilaporkan oleh van der Meij *et al.* (2010) bahwa dalam kurung waktu 1920 hingga 2005 telah hilang tiga (3) famili koral di wilayah Teluk Jakarta dan dua (2) koral di wilayah Kepulauan Seribu bagian utara. Gambaran rusak dan hilangnya karang di Kepulauan Seribu bisa di lihat pada **Gambar 3** di bawah.



**Gambar 3** Tingkat kehilangan koral di Kepulauan Seribu (van der Meij *et al.* 2010)

Secara umum, ancaman kerusakan ekosistem di Kepulauan Seribu dimulai sejak tahun 1970an, ketika nelayan-nelayan mulai diperkenalkan dengan potasium oleh pemodal besar untuk berburu ikan hias (**Tabel 5** menunjukkan periodisasi kerusakan ekosistem). Pencemaran dari potasium ini sangat tinggi dan cukup kuat untuk membunuh terumbu karang yang ada di kepulauan. Menurut warga yang juga pengusaha dan pembudidaya karang, karang mati tiga hari setelah disemprot dengan potasium. Pada tahun-tahun tersebut juga, nelayan diperkenalkan dengan modifikasi alat tangkap, yaitu penyempitan mata jaring, agar jumlah tangkapan lebih banyak. Akibatnya hampir semua ikan, termasuk yang kecil-kecil juga masuk ke dalam jaring nelayan.

**Tabel 5**

Periodisasi kerusakan ekosistem di Kepulauan Seribu

Periode	Kerusakan Ekosistem
1970an	Kondisi ekosistem perairan-laut masih sangat bagus
1980an	1. Nelayan mengenal potasium, akhir 1980an awal 1990an pemakaian potasium cukup massif. Kondisi saat itu, penggunaan potasium 250 kg/nelayan tiap minggu. 2. Pertengahan 1980an pertumbuhan penduduk cukup tinggi, kebutuhan darat-rumah meningkat. Penambangan batu karang mulai tinggi.
1990an	1. Akhir 1980an dan awal 1990an penggunaan potasium dan kompresor semakin massif. 2. Penambangan karang semakin tinggi untuk kebutuhan reklamasi pulau oleh masyarakat dan pembangunan resort. 3. Kerusakan bersama ( <i>tragedy of the common</i> ) ekosistem laut (Karang Lebar) hancur dan API yang tidak ramah lingkungan (Pada <b>Kotak 7</b> ) 4. Awal kerusakan laut karena pembuangan limbah minyak kapal
2000an	Wilayah tangkapan ikan semakin jauh. Nelayan tangkap → budidaya → jasa pariwisata. <b>Kecuali Pulau Untung Jawa</b>
2010an	Tangkapan ikan semakin kecil. Jasa wisata menjadi alternative utama saat ini.

Data pada tabel tersebut diperoleh dari hasil wawancara mendalam bersama masyarakat

Pada tahun 1980an, aktivitas dengan potasium terus mengalami peningkatan. Pada masa ini, penggunaan potasium oleh nelayan mencapai 250 kg/nelayan/minggu. Kerusakan ini semakin diperparah dengan aktivitas nelayan yang juga memburu biota laut untuk memenuhi permintaan pasar ikan hias. Selain itu, pada tahun-tahun tersebut banyak terjadi penyedotan pasir di beberapa pulau di Kepulauan Seribu untuk membangun proyek-proyek di darat, salah satunya untuk Bandara Soekarno-Hatta ([van der Meij et al. 2010](#)). Versi yang lain menyebutkan untuk menimbun Pantai Binaria. Penyedotan pasir-pasir ini mengakibatkan hilangnya beberapa pulau. Pulau-pulau yang hilang tersebut yaitu Pulau Ubi Besar, Pulau Ubi Kecil (Gosong Ubi), Pulau Damar, Pulau Dapur, Pulau Nusi, dan Gosong Putih.<sup>6</sup>

Tahun 1995–1998 adalah masa ketika usaha rumput laut sedang berkembang pesat di beberapa pulau, seperti Pulau Panggang dan Pulau Pari. Saat itu, akumulasi kerusakan alam masih belum terasa, sehingga hasil rumput lautnya masih bagus. Pada tahun 2000, usaha budidaya rumput laut berhenti total karena hasilnya turun akibat dari buruknya kualitas lingkungan. Kerusakan ekosistem yang masif berdampak pada ketersediaan ikan

<sup>6</sup> Keterangan Yahya warga Pulau Untung Jawa

tangkap bagi nelayan. Arifin (2004) melaporkan bahwa telah terjadi penangkapan ikan secara besar pada tahun 1999 dan menurun drastis pada tahun 2000 hingga 2003, hal ini akibat dari rusaknya ekosistem yang berdampak pada rendahnya ketersediaan ikan tangkap bagi nelayan.

Pada tahun 2003–2007, menyusul semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Kepulauan Seribu, menambah kerusakan alam akibat aktivitasnya tersebut. Sebagaimana yang terjadi di Pulau Pari, bahwa jumlah wisatawan di gugus Pulau Pari telah melampaui batas daya dukung biofisik (Triyono 2013). Hal ini terjadi terus hingga sekarang. Harapan pengelola wisata yang melihat semakin banyak pengunjung semakin baik tanpa ada pengendalian pada wisatawan, membuat kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pariwisata menjadi tidak terbendung.

#### **Kotak 6**

Tragedi bersama: Hancurnya lumbung ikan

Wilayah APL dengan nama Karang Lebar merupakan lumbung ikan di wilayah Pulau Panggang. Karang Lebar hancur akibat dua hal, yaitu over fishing dan pengambilan batu karang oleh masyarakat. Over fishing utamanya terjadi pada era tahun 1980an hingga 1990an. Selanjutnya pengambilan batu karang secara besar-besaran dilakukan oleh masyarakat untuk kebutuhan reklamasi dan bahan bangunan rumah.

Wilayah Karang Tengah merupakan habitat ikan tangkap karena di wilayah tersebut hiduplah berbagai karang. Kehancuran Karang Tengah penangkapan ikan hias dengan bantuan potassium dan over fishing oleh nelayan. Selain itu, masyarakat melakukan penambangan karang untuk keperluan perluasan wilayah daratan. Tidak ada batasan pengambilan karang untuk keperluan perluasan wilayah darat atau reklamasi oleh masyarakat. Masyarakat yang mempunyai kemampuan dan daya penambangan yang besar akan melakukan penambangan dengan besar, dan juga faktor kebutuhan daratan yang besar untuk keperluan pemukiman pembuatan rumah oleh masyarakat.

Pola penguasaan dan pemilikan sumber agraria di Pulau Panggang di wilayah daratan bergantung pada sejarah kekerabatan yang paling tua. Wilayah masyarakat di RT 1, 2, 3, 4 tergolong RT yang tua di Pulau Panggang. Para orang tua terdahulu bermukim di wilayah RT tersebut yang pada awalnya darat/tanah adalah kebutuhannya hanya untuk tempat tinggal atau rumah. Hubungan kekerabatan melalui kawin-mawin dan beranak-pinak menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah sebagai tempat bangunan rumah. Sehingga masing-masing pasangan keluarga baru diperbolehkan untuk membuka tanah dan membangun rumah. Hal tersebut berjalan panjang dan mulai awal kemerdekaan 1948-1960an terdapat program pencatatan dan pendaftaran tanah.

### **Masalah Agraria di Kepulauan Seribu**

Kerusakan ekosistem telah nyata terjadi di Kepulauan Seribu. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi pada biota tumbuhan laut, tetapi juga pada ketersediaan air bersih dan lain sebagainya. Kerusakan-kerusakan yang telah ditunjukkan juga sejalan dengan krisis agraria yang terjadi di Kepulauan Seribu. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam bagian sejarah tenurial dan ketimpangan sosial, bahwa perkembangan yang cukup mendasar penguasaan sumber-sumber agraria baik pada pulau-pulau dan alat produksi telah terjadi pelapisan sosial yang tinggi dan ketimpangan sosial yang besar.

Persoalan/masalah ekosistem yang disebabkan oleh cemaran limbah baik yang hadir dari wilayah utara Pulau Jawa/DKI Jakarta melalui muara-muara sungai dan limpahan

limbah minyak yang sengaja dibuang oleh kapal serta kerusakan ekosistem akibat aktivitas produksi masyarakat menyebabkan sempitnya ruang kelola dan hidup masyarakat. Selanjutnya perosalan agraria, dimana mayoritas pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu telah dikuasai oleh privat dan/atau swasta memberikan dampak tersendiri pada masyarakat nelayan. Pola dan tata-guna pulau dan perairan yang selama ini menjadi ruang jelajah masyarakat menjadi semakin sempit.

Dari kedua persoalan tersebut, muncul sebuah alternatif penghidupan masyarakat yaitu melalui jasa wisata. Jasa wisata bahari yang sebenarnya menjadi sebuah alternatif bagi masyarakat akan/telah menjadi persoalan tersendiri. Kembali pada persoalan ekosistem dan agraria, kedua hal ini juga akan mengikuti sebagai persoalan tersendiri tatkala jasa wisata bahari sudah digeluti oleh masyarakat. Kepemilikan dan penguasaan pulau-pulau oleh privat, khususnya, akan membawa persoalan dan ketimpangan baru bagi masyarakat. Kepemilikan pulau secara privat dengan didukung oleh pendanaan/kapital besar menjadikan pulau privat sebagai pasar yang eksklusif bagi wisatawan bahari. Hal ini bisa dilihat dari resort Pulau Puteri.

**Tabel 6**

Persoalan-persoalan di Kepulauan Seribu

No	Ragam Persoalan
<b>A</b>	<b>Krisis Ekosistem</b>
	1. Hancurnya ekosistem biota laut
	2. Persediaan ikan tangkap berkurang
	3. Persediaan air bersih yang rawan dan kritis (Perbandono 2012)
	4. Persediaan bahan pangan yang minim
	5. Produksi sampah yang terus meningkat
<b>B</b>	<b>Krisis Agraria</b>
	1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi
	2. Wilayah darat untuk pemukiman yang semakin sempit bahkan telah habis
	3. Penguasaan pulau-pulau kecil oleh privat dan swasta
	4. Penguasaan alat-alat produksi untuk nelayan tangkap ataupun budidaya
	5. Penguasaan alat-alat produksi jasa wisata bahari

Penguasaan terhadap alat produksi, baik penangkapan ikan, budidaya dan jasa wisata saat ini telah bisa rasakan oleh masyarakat. Akibat kerusakan ekosistem berdampak pada ketersediaan ikan tangkapan nelayan. Alternatif di depan mata adalah nelayan sekaligus menangkap dan budidaya ikan, mulai bergerak pada jasa wisata. Tetapi hal ini tidak secara signifikan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat nelayan. Mayoritas masyarakat berusaha wisata bahari secara sendiri-sendiri, atau belum terorganisir dengan baik, kecuali di Pulau Pari dan Untung Jawa. Di Pulau Pramuka, Pulau Harapan dan Kelapa sangat terlihat bagaimana persaingan masyarakat dalam usaha jasa wisata bahari. Persaingan ini tentunya bisa mudah ditebak siapakah pihak-pihak yang dimenangkan dan mendapatkan manfaat besar dari wisata bahari. Persoalan-persoalan di Kepulauan Seribu baik dari segi perubahan ekosistem, sosial dan agraria adalah sebagai berikut pada **Tabel 6**.

### Rencana Pengembangan Wisata Bahari

Rencana ekowisata oleh KSPN secara umum masih belum diketahui oleh masyarakat. Lokasi mana yang akan menjadi lokasi tepatnya rencana ekowisata itu masih simpang siur. Apakah keseluruhan kepulauan seribu atau bagian tertentu, masih belum jelas. Bahkan beberapa petugas kabupaten dan petugas suku dinas pariwisata kepulauan seribu tidak mengetahui kepastian rencana tersebut. Sehingga dengan demikian menjadi tidak mengherankan jika sosialisasi di tingkat masyarakat sendiri bisa dibilang tidak ada.

Walau demikian, warga di pulau Pramuka memberikan kesaksian bahwa pada akhir tahun 2016, sekitar bulan agustus atau september, pernah ada undangan untuk sosialisasi pariwisata. Dia sendiri tidak bisa memastikan ini adalah sosialisasi rencana KSPN atau bukan. Tapi yang menjadi rancu adalah, pada saat akhir pertemuan ini masyarakat diminta untuk menandatangani MoU. Tidak ada seorang pun dari warga yang hadir di pertemuan itu yang pernah membaca isi MoU tersebut.

Dari kesimpang-siuran tersebut, berdasarkan keterangan dari beberapa responden, setidaknya ada tiga kemungkinan lokasi yang mempunyai potensi untuk dijadikan lokasi utama KSPN. Kemungkinan tersebut yaitu:

1. Jika tujuan yang ingin dibangun oleh pemerintah adalah konsep ekowisata, maka lokasi yang paling mendukung dari segi kondisi alamnya dan tingkat pencemarannya adalah bagian utara dari kepulauan seribu. Tidak dipungkiri bahwa di lokasi ini juga sudah terjadi kerusakan yang parah. Tapi jika dibandingkan dengan yang di selatan, kerusakannya masih lebih sedikit. Menurut masyarakat, semakin ke arah utara kepulauan seribu, kerusakannya semakin bagus.
2. Menurut rusli, jika dilihat dari sarana yang ada di pulau-pulau pemukiman (tidak melihat pulau pribadi), yang paling siap untuk dijadikan destinasi wisata adalah pulau untung jawa dan pulau tidung.
3. Pak Mai, warga pulau pramuka mengaku pernah mengikuti satu pertemuan di bali yang membahas tentang wisata. Pada saat itu, ditentukan sekitar 60-an pulau yang akan dijadikan destinasi wisata utama di kepulauan seribu. Jika dilihat dari kepemilikan pulau, jumlah ini sesuai dengan jumlah pulau-pulau pribadi. Jika mengikuti keterangan ini maka yang akan menjadi sorotan utama dalam rencana KSPN adalah pulau-pulau pribadi.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Kerusakan ekosistem di Kepulauan Seribu mempunyai sejarah yang cukup panjang dan akan terus terjadi jika hal tersebut tidak segera diantisipasi. Kerusakan-kerusakan ekosistem disebabkan oleh aktivitas masyarakat nelayan; cemaran/limpahan limbah minyak yang sengaja dibuang oleh kapal laut; cemaran materi yang dibawa oleh limpasan muara-muara sungai yang berada di Teluk Jakarta; aktivitas wisata bahari; dan produksi sampah baik oleh masyarakat Kepulauan Seribu dan pendatang wisatawan. Kerusakan ekosistem yang telah ada berupa hancurnya biota laut/terumbu karang dan karang; persediaan air bersih dan tawar; serta ketersediaan ikan yang telah berkurang.

Penguasaan pulau-pulau kecil oleh privat menyebabkan semakin sempit dan hilangnya ruang kelola dan hidup masyarakat Kepulauan Seribu. Kerusakan ekosistem

yang berakibat pada turunnya persediaan ikan melahirkan alternatif penghidupan bagi masyarakat nelayan berupa jasa wisata bahari. Tetapi, hal ini tidak akan terjadi dengan baik. Penguasaan pulau-pulau kecil oleh privat dan alat-alat produksi jasa wisata menyebabkan masyarakat hanya akan berusaha dalam corak usaha wisata berupa pemandu wisata, penyedia sarana transportasi, dan katering bagi wisatawan.

Pada saat ini, Kepulauan Seribu menjadi tujuan wisata yang cukup tinggi bagi masyarakat Pulau Jawa/DKI Jakarta dan wisatawan mancanegara. Kondisi tersebut akan memberikan pengaruh dan dampak tersendiri bagi kondisi ekosistem dan sosial bagi masyarakat. Tetapi, jika dilihat dari krisis ekosistem dan krisis agraria yang telah terjadi, masyarakat Kepulauan Seribu khususnya yang hanya mempunyai faktor produksi kecil tidak akan menerima manfaat secara signifikan dibandingkan pihak yang lain. Hal ini akan terlihat lebih jelas pada pihak-pihak yang menguasai alat produksi secara massal dan pulau-pulau kecil.

### Rekomendasi

Hasil penelitian merekomendasikan beberapa poin, yaitu:

1. Perlu dilaksanakannya kajian mengenai penguasaan sumber-sumber agraria pulau dan analisis kekrisisan ekosistem di Kepulauan Seribu.
2. Penataan ulang pada kepemilikan dan akses terhadap sumber-sumber agraria pulau, khususnya terhadap penguasaan pulau-pulau kecil.
3. Kerusakan ekosistem yang tinggi menuntut adanya alternatif pola usaha bagi masyarakat, sehingga usaha dalam pengembangan ekonomi selayaknya untuk kemanfaatan masyarakat pulau.
4. Rambu-rambu daya dukung baik ekosistem atau sosial-ekonomi dan agraria menjadi penting dalam upaya membangun wisata bahari.
5. Kondisi penguasaan pulau-pulau oleh privat, mempunyai potensi bahwa pihak yang diuntungkan terhadap program pembangunan wisata bahari bukanlah masyarakat, tetapi pemilik pulau, privat dan swasta.

### DAFTAR ACUAN

- Arifin Z. 2004. *Local Millenium Ecosystem Assessment: Condition and Trend of the Greater Jakarta Bay Ecosystem*. Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup.
- Bappenas. 2016. Pembangunan pariwisata. *Di dalam* Multilateral Meeting I, 2016 Februari 29. Jakarta (ID): Kedeputusan Bidang Ekonomi-Bappenas.
- BPS Kepulauan Seribu. 2016. *Kepulauan Seribu Dalam Angka 2015*. Jakarta (ID): BPS Kepulauan Seribu.
- BPS. 2010a. Statistik Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Status Pekerjaan Utama Kabupaten Kepulauan Seribu. *Di dalam* Sensus Penduduk 2010. Di akses melalui <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=291&wid=3101000000> [10 April 2017].
- Bird ECF, Ongkosongo OSR. 1980. *Environmental Changes on the Coasts of Indonesia*. Tokyo (JP): The United Nation University.

- Dolman AJ. 1990. The potential contribution of marine resources to sustainable development in small-island developing countries. *Di dalam* Beller W, d'Ayalin P, Hein P (ed). 1990. *Sustainable Development and Environmental Management of Small Islands*. Paris (FR): UNESCO.
- Estradivari, Setyawan E, Yusri S. 2009. *Terumbu Karang Jakarta: Pengamatan Jangka Panjang Terumbu Karang Kepulauan Seribu (2003-2007)*. Jakarta (ID): Yayasan Terumbu Karang Indonesia.
- Farhan AR, Lim S. 2011. Resilience assessment on coastline changes and urban settlements: A case study in Seribu Islands, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*. 54:391-400. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2010.12.003.
- Farhan AR, Lim S. 2012. Vulnerability assessment of ecological conditions in Seribu Islands, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*. 65:1-14. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2012.04.015.
- Farhan AR, Lim S. 2013. Improving vulnerability assessment towards Integrated Coastal Zone Management (ICZM): a case study of small islands in Indonesia. *Journal of Coastal Conservation*. 17(3): 351-367. DOI: 10.1007/s11852-013-0269-9.
- Hutomo M, Djarnali A. 1978. Fluktuasi gumpalan minyak (Tar Ball) yang terdampar di Gugus Pulau Pari, wilayah Pulau-Pulau Seribu [*laporan penelitian*]. Jakarta (ID): Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mujjiani, Hidayat D, Rachmawati L, Soetopo T, Aji GB, Cahyadi R. 2002. *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil: Partisipasi Masyarakat di Kepulauan Seribu*. Jakarta (ID): Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Poerbandono. 2012. The Seribu Islands patch reef complexes: A geospatial revisit toward a compendium of risk on Indonesian Small Islands. *Di akses melalui* <http://pintu.instun.gov.my/assets/file/attachment/01ns1s1fxseR32zh5ZyIZ11HIaGdv8Vw.pdf> [20 April 2017].
- Putro HR. 2016. Konsep ekowisata dan perubahan sosial. *Di dalam* Focus Group Discussion (FGD) Pedesaan dan Ekowisata, 2016 Desember 8. Bogor (ID): Sajogyo Institute Bogor.
- Ratman DR. 2016. Pembangunan destinasi pariwisata prioritas 2016-2019. *Di dalam* Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata: Akselerasi Pembangunan Kepariwisata dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta, 2016 Januari 27. Jakarta (ID): Kementerian Pariwisata.
- Sachomar SI. 2008. Analisis kondisi lingkungan perairan Kepulauan Seribu. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*. 4(1):19-26.
- Soekarno R. 1989. Comparative studies on the status of Indonesian Coral Reefs. *Netherlands Journal of Sea Research*. 23(2):215-222. DOI: 10.1016/0077-7579(89)90015-X.
- Triyono. 2013. Penilaian ekonomi dan daya dukung wisata bahari di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta [*tesis*]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana IPB.
- Unepetty PA, Evans SM. 1997. Accumulation of beach litter on islands of the Pulau Seribu Archipelago, Indonesia. *Marine Pollution Bulletin*. 34(8): 652-655. DOI: 10.1016/S0025-326X(97)00006-4.
- Umbgrove JHF. 1949. *Structural History of the East Indies*. Cambridge (UK): Cambridge University Press.

- Utomo B. 2015. Prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Bahan Presentasi.
- Van Bemmelen RW. 1949. *The Geology of Indonesia*. Govt. Printing Office, The Hague.
- Widayanto HS, Helmi M, Munasik, Wouthuyzen S. 2009. Penentuan indeks kerentanan ekosistem terumbu karang menggunakan pemodelan spasial berbasis sel di Gugusan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. *Globe Volume*. 11(2):88-96.
- Willoughby NG, Sangkoyo H, Lakaseru, BO. 1995. Long term changes in strand line litter around the Thousand Islands, Jakarta Bay, Indonesia. *Di dalam* Soemodihardjo S (ed.). 1995. *Proceedings: Coral Reef Evaluation Pulau Seribu*. Jakarta (ID): IOCUNESCO and Indonesian Institute of Sciences (LIPI).

## Lampiran

Penguasaan pulau secara privat di Kepulauan Seribu

No	Nama Pulau	Luas (Ha)	Nama Pemilik
<b>Kelurahan Pulau Pari</b>			
1	Pulau Karang Kudus	0.76	PT. Central Pondok S
2	Pulau Biawak	0.24	PT. Central Pondok S
3	Pulau Tengah	2.00	PT. Setia Utama Island
4	Pulau Kongsu	1.63	Balai Penelitian Perikanan Laut
5	Pula Pari	41.32	PT. Bumi Pari Asri dan PT. Insodat TBK
6	Pulau Burung	3.26	RD. Herman Susilo dan Pintraso Adijanto
7	Pulau Tikus	1.20	RD. Herman Susilo dan Pintraso Adijanto, Suparno Adijanto
8	Pulau Lancang Besar	15.13	-
9	Pulau Lancang Kecil	11.03	Manfred Pitrueschka dan PT. Fadent Gema Scorpio
10	Pulau Bokor	18.00	Pemda
11	Pulau Gundul	0.9	-
12	Pulau Karang Kudus Lempeng	0.48	PT. Central Pondok S
<b>Kelurahan Pulau Panggang</b>			
13	Pulau Opak kecil	1.10	Yayasan Lestari Tirta Darma
14	Pulau Karang Borok	0.50	Antoni lion
15	Pulau Kotok Kecil	1.30	Ricardo Ligael
16	Pulau Kotok besar	20.75	Kiki; PT. Kotok Wisata Indah
17	Pulau Karang Congkak	0.65	Antoni Lion
18	Pulau Gosong Pandan	0.20	Budi Hermanto Liangga
19	Pulau Semak Daun	0.75	Ade Supriatna
20	Pulau Panggang	9.00	-
21	Pulau Karya	6.00	Pemda
22	Pulau Pramuka	16.00	-
23	Pulau Gosong Sekali	0.20	Henky
24	Pulau Air	2.90	Ponco Sutowo
25	Pulau Peniki	3.00	H. Sulung Poniman
26	Pulau Gosong Pramuka	0.50	PT. Nusa Keramba
<b>Kelurahan Pulau Harapan</b>			
27	Pulau Sabira	8.82	Dirjen Perhubungan Laut
28	Pulau Dua Timur	18.48	H. Dede
29	Pulau Peteloran Kecil	0.50	-
30	Pulau Peteloran Besar	1.63	Setiadi Kumala
31	Pulau Penjaliran Barat	17.90	PHPA
32	Pulau Penjaliran Timur	14.24	PHPA
33	Pulau Jagung	7.92	Sujito`ng
34	Pulau Rengit	9.78	Tomi Winata
35	Pulau Nyamplung	6.58	Sofyan Ali Sabana

No	Nama Pulau	Luas (Ha)	Nama Pemilik
36	Pulau Sebaru Besar	37.70	H. Sutrino; Amek; Sujito`ng; Jumada
37	Pulau Laga	4.92	H. Ade
38	Pulau Kayu angin Semut	0.70	Nn. Wijaya
39	Pulau Sepa Timur	3.50	Muchtar
40	Pulau Sepa Barat	5.68	PT. Sepa Permai; Sujito`ng
41	Pulau Semut Besar	6.50	Setia Kumala
42	Pulau Perak	3.06	Sujito`ng
43	Pulau Tondan timur	7.38	Samadikun
44	Pulau Tondan Barat	11.82	Sujito`ng
45	Pulau Putri Timur	6.93	Haryo Seno
46	Pulau Kayu angin Bira	0.26	Beny Sumampouw
47	Pulau Belanda	0.46	Beny Sumampouw
48	Pulau Bira besar	29.13	Patra Bira
49	Pulau Bira kecil	7.30	Bambang Tri Atmojo
50	Pulau Kuburan Cina	0.25	Edy Idup
51	Pulau Bulat	1.28	Indra rukmana
52	Pulau Pemagaran	15.56	Sujito`ng
53	Pulau Harapan	6.70	Masyarakat
54	Pulau Opok Besar	9.74	Bambang Handoro; Nn. Wijaya
55	Pulau Gosong Laga Besar	-	-
56	Pulau Boton	-	-